



PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA

PERJANJIAN KINERJA

Dinas Pertanahan dan
Penataan Ruang

TAHUN 2022

DINAS PERTAAHAN DAN PENATAAN RUANG
Jl. Muso Bin Salim No.6, Tenggarong.75512
e-mail : dinaspertaru@gmail.com



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SETIANTO NUGROHO AJI, SH., M. Si**

Jabatan : **KEPALA DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si**

Jabatan : **BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target pada perjanjian kinerja dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026 pada Perangkat Daerah yang saya pimpin.
2. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
3. Melaksanakan dan Melaporkan Progres Penataan dan Penertiban Aset Daerah;
4. Melaksanakan Input Rencana Umum Pengadaan pada Aplikasi SiRUP tepat waktu dan berkesesuaian;
5. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
6. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;

7. Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah;
8. Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah.
9. Meningkatnya Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
10. Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;
11. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
12. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi;

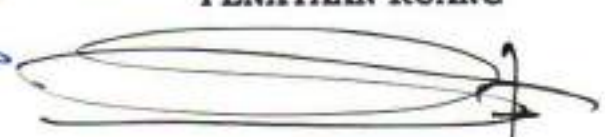
Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,
BUPATI KUTAI KARTANEGARA


Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si

Pihak Pertama,
**KEPALA DINAS PERTANAHAN DAN
PENATAAN RUANG**


SETIANTO NUGROHO AJI, S.H., M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19671027 199403 1 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya penataan, penguasaan, dan pemanfaatan pertanahan	Persentase Penanganan Sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Persen	80
		Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Persen	70
		Persentase tersedianya tanah objek landreform yang siap di redistribusikan ke masyarakat	Persen	83
		Persentase tersedianya tanah untuk masyarakat	Persen	82
		Persentase Tanah Aset Pemerintah Yang Bersertifikat	Persen	55
2.	Meningkatnya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	Persen	65
3.	Meningkatnya Transparansi dan akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Temuan Administrasi BPK/Inspektorat yang ditindak Lanjuti	Jumlah	1
		Persentase Identifikasi, Inventarisasi Aset Dalam Penelusuran	Persen	100
		Pengamanan Bidang Tanah	Jumlah	1

		Persentase Ketepatan Waktu dan Kesesuaian Input Rencana Umum Pengadaan pada Aplikasi SiRUP (Maksimal 7 Hari Kerja setelah Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Maksimal 14 hari Kerja setelah kesepakatan RAPBD Tahun 2022)	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan Serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
		Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	Baik(B) 60-70
4.	Meningkatnya Pemenuhan Ketersediaan data dan Informasi Pembangunan Berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar	Persen	100
5.	Membuat Inovasi dan /atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai fungsi perangkat daerah	Jumlah Inovasi	Jumlah	1
6.	Meningkatnya Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pemenuhan Indikator Kinerja Kunci pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persen	100
7.	Teralisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	Persen	100

**PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.820.000.000,00	APBD
2	Program Penunjangan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	12.251.906.166,00	APBD
3	Program Pengelolaan Izin Lokasi	110.000.000,00	APBD
4	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	275.000.000,00	APBD
5	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	250.000.000,00	APBD
6	Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	300.000.000,00	APBD
7	Program Penetapan Tanah Ulayat	75.000.000,00	APBD
8	Program Pengelolaan Tanah Kosong	592.024.714,00	APBD
9	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	150.000.000,00	APBD
10	Program Penatagunaan Tanah	100.000.000,00	APBD
JUMLAH ANGGARAN		15.923.930.880,00	APBD

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,
BUPATI KUTAI KARTANEGARA


Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si

Pihak Pertama,
**KEPALA DINAS PERTANAHAN DAN
PENATAAN RUANG**


SETIANTO NUGROHO AJI, SH., M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19671027 199403 1 008



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **H.SURYA AGUS,SP.,M.Si**

Jabatan : **SEKRETARIS**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SETIANTO NUGROHO AJI,SH.,M.Si**

Jabatan : **KEPALA DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target pada perjanjian kinerja dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026 pada Perangkat Daerah yang saya pimpin.
2. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
3. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
4. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
5. Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan sesuai dengan Tugas dan fungsi jabatan;
6. Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah;
7. Terealisasi Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;

8. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke pada kepala perangkat daerah;
9. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

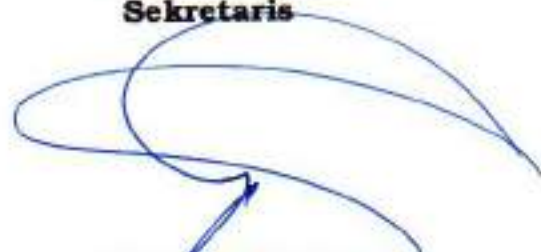
Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,
**KEPALA DINAS
PERTANAHAN DAN PENATAAN
RUANG**



SETIANTO NUGROHO AJLSH., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/C)
NIP. 19671027 199403 1 008

Pihak Pertama,
Sekretaris



H.SURYA AGUS, SP., M.Si
Pembina TK.1/4B
NIP.196612152000121001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	74
2	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti paling lambat 60 hari kerja	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
		Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Persen	100
3	Meningkatnya Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Tugas dan Fungsi Jabatan	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar	Persen	100
4	Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	Persen	100

PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	PROGRAM/SUB.KEGIATAN/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.251.906.166	APBD
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	125.000.000	APBD
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	75.000.000	APBD
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.000.000	APBD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.157.365.382	APBD
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.871.245.382,00	APBD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	286.120.000	APBD
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	74.000.000	APBD
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	74.000.000	APBD
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.000.000	APBD
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	100.000.000	APBD
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	716.275.300	APBD
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	34.967.700	APBD

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	104.947.200	APBD
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	170.545.400	APBD
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	60.000.000	APBD
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	245.815.000	APBD
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100.000.000	APBD
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.418.305.484	APBD
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	215.000.000	APBD
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.203.305.484	APBD
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.660.960.000	APBD
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	67.500.000	APBD
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	393.460.000	APBD
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.200.000.000	APBD
JUMLAH ANGGARAN		Rp.12.251.906.166.-	APBD

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,
**KEPALA DINAS
PERTANAHAN DAN PENATAAN
RUANG**



SETIANTO NUGROHO AJI, SH., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/C)
NIP. 19671027 199403 1 008

Pihak Pertama,
Sekretaris



H. SURYA AGUS, SP., M.Si
Pembina TK.I/4B
NIP.196612152000121001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **INDRA WAHYUNI,SP**

Jabatan : **PERENCANA AHLI MUDA SELAKU SUB KOORD
PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H.SURYA AGUS,SP.,M.Si**

Jabatan : **SEKRETARIS**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. mengolah data dan informasi;
2. mengefektifkan pelaksanaan pengumpulan data;
3. menganalisis data dan informasi;
4. menyajikan data dan informasi;
5. menyusun rancangan Rencana anggaran dan pembiayaan pembangunan;
6. melakukan persiapan Pengendalian pelaksanaan rencana;

Serta berjanji menjalankan tugas sebagai sebagai Sub Koordinator Penyusunan Program dan Keuangan;

7. Mewujudkan target pada perjanjian kinerja dalam 1 (satu) Tahun Anggaran Sebagaimana Tertuang dalam Rencana Anggaran (Renja), serta dalam rangka mencapai target Kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan saya ;

8. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Inspektorat Daerah ;
9. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
10. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
11. Pemenuhan Ketersediaan Dta dan Informasi Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan;
12. Membuat Inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah;
13. Teralisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;
14. Melakukan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke pada pihak perangkat daerah;
15. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,
SEKRETARIS



H. SURYA AGUS, S.P., M.Si

PEMBINA (IV/A)

NIP. 19661215 200012 1 001

Pihak Pertama,
**PERENCANA AHLI MUDA SELAKU
SUB KOORD PENYUSUNAN
PROGRAM DAN KEUANGAN**



INDRA WAHYUNI, SP

PENATA TINGKAT I (III/C)

NIP. 19780617 200801 2 023

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Tersedianya laporan hasil pengolahan data dan informasi	Jumlah Laporan hasil pengolahan data dan informasi	Laporan	1
2.	Tersedianya laporan pelaksanaan pengumpulan data	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan pengumpulan data	Laporan	1
3.	Tersedianya laporan hasil analisis data dan informasi	Jumlah Laporan hasil analisis data dan informasi	Laporan	1
4.	Tersedianya laporan hasil penyajian data dan informasi	Jumlah Laporan penyajian data dan informasi	Laporan	1
5.	Tersedianya rancangan Rencana anggaran dan pembiayaan pembangunan	Jumlah rancangan Rencana anggaran dan pembiayaan pembangunan	Rancangan	1
6.	Tersedianya laporan persiapan Pengendalian pelaksanaan rencana	Jumlah laporan persiapan Pengendalian pelaksanaan rencana	Laporan	1

TUGAS SEBAGAI SUB KOORDINATOR PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Tersedianya dokumen perencanaan	Jumlah Dokumen Penyusunan perencanaan perangkat daerah	Dokumen	10
2	Tersedianya dokumen evaluasi kinerja	Jumlah Dokumen evaluasi perangkat daerah	Dokumen	5
3	Tersedianya gaji dan tunjangan bagi ASN	gaji dan tunjangan bagi ASN	Dokumen	76
4	Tersedianya laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran	Dokumen	2

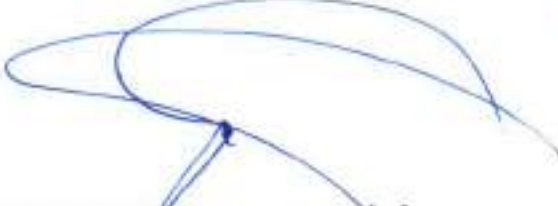
5	Tersedianya dokumen barang milik daerah	Jumlah dokumen barang milik daerah	Dokumen	10
6	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti paling lambat 60 hari kerja	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
		Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Persen	100
7	Meningkatnya Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan sesuai dengan Tugas dan fungsi jabatan	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar	Persen	100
8	Terealisasinya Kegiatan Menimbulkan Utang	Output Tanpa Potensi Capaian Output Kegiatan	Persen	100

PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	75,000,000	APBD
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50,000,000	APBD
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7,871,245,382	APBD
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	286,120,000	APBD
5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	74,000,000	APBD
JUMLAH ANGGARAN		Rp. 8,356,365,382.00	APBD

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,
SEKRETARIS


H.SURYA AGUS, S.P., M.Si
 PEMBINA (IV/A)
 NIP. 19661215 200012 1 001

Pihak Pertama,
**PERENCANA AHLI MUDA SELAKU
 SUB KOORD PENYUSUNAN
 PROGRAM DAN KEUANGAN**


INDRA WAHYUNI, SP
 PENATA TINGKAT I (III/C)
 NIP.19780617 200801 2 023



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SYAIFUL ANWAR, S.Sos**

Jabatan : **Kepala Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H.SURYA AGUS,SP.,M.Si**

Jabatan : **Sekretaris**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan saya;
2. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
3. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
4. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
5. Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan sesuai dengan Tugas dan fungsi jabatan;
6. Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah;
7. Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;

8. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke pada kepala perangkat daerah;
9. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,
Sekretaris



H.SURYA AGUS, SP., M.Si
Pembina TK.I/4B
NIP.196612152000121001

Pihak Pertama,
**Kepala Sub Bagian Umum dan
Ketatalaksanaan**



SYAIFUL ANWAR, S.Sos
Penata TK.I/3D
NIP.197106192001121001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan	1
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen insatalasi listrik	Jumlah Komponen	9
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang disediakan	Jenis	45
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah porsi makanan dan minuman yang disediakan	1). Jenis 2). Kotak, 3). Porsi	1). 7 2). 1200 3). 1000
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penggandaan	1) jenis 2) Lembar	1) 4 2) 36000
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi	Kali	15
7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen	Dokumen	1
8	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rekening	5
9	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1) Jumlah bulan penyediaan tenaga pendukung non PNS, 2) Tersedianya Tenaga Kebersihan Kantor	1) Orang, 2) Orang	1) 51 2) 8
10	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pajak kendaraan dinas	Unit	6

11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaran dinas yang dipelihara	Unit	6
12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dilakukan Rehab	Gedung	1

PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 34.967.700,-	APBD
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 104.947.200,-	APBD
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 170.545.400,-	APBD
4	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Rp. 60.000.000,-	APBD
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 245.815.000,-	APBD
6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp. 100.000.000,-	APBD
7	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Rp. 215.000.000,-	APBD
8	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 1.203.305.484,-	APBD
9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 67.500.000,-	APBD
10	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 393.460.000,-	APBD
11	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 1.200.000.000,-	APBD
JUMLAH ANGGARAN		Rp. 3.795.540.784,-	APBD

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,
Sekretaris



H.SURYA AGUS, SP., M. Si
Pembina TK.I/4B
NIP.196612152000121001

Pihak Pertama,
**Kepala Sub Bagian Umum dan
Ketatalaksanaan**



SYAIFUL ANWAR, S.Sos
Penata TK.I/3D
NIP.197106192001121001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **HJ. AJI NURUL AISYAH, S.Sos**

Jabatan : **ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI
MUDA SELAKU SUB KOORDINATOR SUB BAGIAN
KEPEGAWAIAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. SURYA AGUS, S.P., M.,Si**

Jabatan : **SEKRETARIS**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Melakukan Analisis Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara serta Pengembangan Karier ASN berdasarkan Pola Karier ASN dan Penugasan ASN;
2. Melakukan Analisis Disiplin ASN untuk Penentuan Rekomendasi Penghargaan ASN serta Pemberian Hukuman Hingga Pemeberhentian ASN;
3. Pelaksanaan Proses Cuti ASN;

Serta berjanji menjalankan tugas sebagai Sub Koordinator:

4. Mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan saya;
5. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;

PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	100.000.000	APBD
JUMLAH ANGGARAN		100.000.000	APBD

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,
SEKRETARIS



H. SURYA AGUS, S.P., M., Si
Pembina, IV/a
NIP. 19661215 200012 1 001

Pihak Pertama,
ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA
APARATUR AHLI MUDA
SUB KOORD SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN



H.J. AJI NURUL AISYAH, S.Sos
Penata Tingkat I, III/d
NIP. 19670925 200012 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara	Jumlah Kebutuhan ASN	Dokumen	5
		Jumlah Entry Data pada Aplikasi ANJAB ABK	Data	66
2	Pengembangan Karier ASN	Menganalisis Proses Penyusunan Pola Karier ASN	Dokumen	1
3	Pola Karier ASN	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Proses Penyusunan Pola Karier	Dokumen	1
4	Penugasan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Proses Penugasan	Dokumen	66
		Jumlah Dokumen sistem informasi manajemen yang dikelola	Dokumen	66
		Jumlah Dokumen hasil analisis kebutuhan pelatihan ASN	Dokumen	5
		Jumlah Dokumen evaluasi kebutuhan pelatihan ASN	Dokumen	5
		Jumlah Dokumen pengelolaan kinerja aparatur	Dokumen	66
		Jumlah Dokumen penilaian SKP	Dokumen	66

		Jumlah Dokumen catatan/record kinerja pegawai	Dokumen	66
5	Disiplin ASN	Jumlah Dokumen hasil analisis proses disiplin aparatur sipil negara/ Kasus	Dokumen	5
6	Penghargaan ASN	Jumlah Dokumen hasil rumusan rekomendasi penghargaan	Dokumen	3
7	Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen hasil analisis analisis proses pemberhentian (Pensiun PNS)	Dokumen	4
8	Cuti ASN	Jumlah Dokumen hasil analisis proses cuti aparatur sipil	Dokumen	20

TUGAS SEBAGAI SUB KOORDINATOR SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Pelaksanaan Pelatihan Peningkatan SDM ASN	Jumlah Pelaksanaan Pelatihan	Pelatihan	2
2	Terlaksananya Proses Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen ASN yang naik pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, Pensiun, Cuti, Pembuatan ASKES, TASPEN, KARPEG, KARIS/KARSU, Penghargaan, Pemberian Sanksi, Pengembangan Kompetensi Kepegawaian.	Dokumen	30
3	Terlaksananya Proses Entry Data Pegawai	Jumlah Data Entry pada SIMPAG, ANJAB	Data	66

		ABK.		
4	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti paling lambat 60 hari kerja	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
		Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Persen	100
5	Meningkatnya Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan sesuai dengan Tugas dan fungsi jabatan	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar	Persen	100
6	Terealisasinya Kegiatan Menimbulkan Utang Output Tanpa Potensi	Capaian Output Kegiatan	Persen	100

6. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
7. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
8. Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Kepegawaian sesuai dengan Tugas dan fungsi jabatan;
9. Terealisasinya Output Kegiatan Yang Dilaksanakan Pada Tahun 2022 Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;
10. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke pada kepala perangkat daerah;
11. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

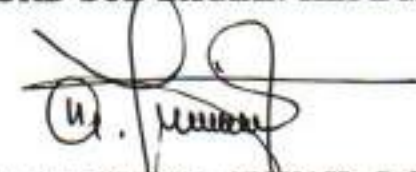
Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,
SEKRETARIS



H. SURYA AGUS, S.P., M., Si
Pembina, IV/a
NIP. 19661215 200012 1 001

Pihak Pertama,
**ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA
APARATUR AHLI MUDA
SUB KOORD SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN**



HJ. AJI NURUL AISYAH, S.Sos
Penata Tingkat I, III/d
NIP. 19670925 200012 2 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MOHAMAD DAHLAN,SH.**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PENGADAAN DAN PENATAAN
ADMINISTRASI PERTANAHAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SETIANTO NUGROHO AJI, SH., M.Si**

Jabatan : **KEPALA DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target pada perjanjian kinerja dalam 1 (satu) Tahun Anggaran Sebagaimana Tertuang dalam Rencana Anggaran (Renja), serta dalam rangka mencapai target Kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan saya ;
2. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Inspektorat Daerah ;
3. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
4. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
5. Pemenuhan Ketersediaan Dta dan Informasi Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan;
6. Membuat Inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah;
7. Teralisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;

8. Melakukan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke pada pihak perangkat daerah;
9. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,
**KEPALA DINAS
PERTANAHAN DAN PENATAAN
RUANG**



SETIANTO NUGROHO AJI, SH., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/C)
NIP. 19671027 199403 1 008

Pihak Pertama,
**KEPALA BIDANG PENGADAAN DAN
PENATAAN ADMINISTRASI
PERTANAHAN**



MOHAMAD DAHLAN, SH
PEMBINA TINGKAT 1 (IV/B)
NIP. 19671117 200012 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya penataan, penguasaan, dan pemanfaatan pertanahan	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Persen	70
		Persentase tersedianya tanah objek landreform yang siap di redistribusikan ke masyarakat	Persen	83
		Persentase tersedianya tanah untuk masyarakat	Persen	82
2	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti paling lambat 60 hari kerja	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
		Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Persen	100
3	Meningkatnya Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan sesuai dengan Tugas dan fungsi jabatan	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar	Persen	100
4	Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	Persen	100

PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	250,000,000	APBD
1	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	250,000,000	APBD
	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	300,000,000	APBD
2	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	200,000,000	APBD
3	Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100,000,000	APBD

	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	150,000,000	APBD
4.	Penerbitan Izin Membuka Tanah	150,000,000	APBD
JUMLAH ANGGARAN		Rp. 700, 000,000.00	APBD

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,
**KEPALA DINAS
PERTANAHAN DAN PENATAAN
RUANG**



SETIANTO NUGROHO AJI,SH.,M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/C)
NIP. 19671027 199403 1 008

Pihak Pertama,
**KEPALA BIDANG PENGADAAN DAN
PENATAAN ADMINISTRASI
PERTANAHAN**



MOHAMAD DAHLAN,SH
PEMBINA TINGKAT 1 (IV/B)
NIP. 19671117 200012 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **YANI WARDHANA, S.Sos**

Jabatan : **PENATA KADASTRAL AHLI MUDA SELAKU SUB KOORD
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN ADM. PERTANAHAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **MOHAMAD DAHLAN,SH**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PENGADAAN DAN PENATAAN
ADMINISTRASI PERTANAHAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. menelaah data perencanaan redistribusi tanah;
2. mengolah data pemantauan dan evaluasi hasil redistribusi tanah;
3. menyusun konsep keputusan redistribusi tanah;
4. mengelola data inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah;
5. melaksanakan identifikasi lapangan dalam rangka pengendalian dan pemantauan pertanahan;
6. menyusun jadwal pelaksanaan pekerjaan survei;
7. melakukan koordinasi dan penyuluhan kegiatan survei kadastral dengan unsur terkait kabupaten/kota;
8. menyusun laporan kompilasi kegiatan pemetaan kadastral;

Serta berjanji menjalankan tugas sebagai Sub Koordinator:

1. Mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai

Kartanegara pada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan saya;

2. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
3. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
4. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
5. Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan sesuai dengan Tugas dan fungsi jabatan;
6. Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang Penataan Administrasi Pertanahan sesuai dengan fungsi perangkat daerah;
7. Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;
8. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja kepada kepala perangkat daerah;
9. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG PENGADAAN DAN
PENATAAN ADMINISTRASI
PERTANAHAN**


MOHAMAD DAHLAN, SH
PEMBINA TK 1 (IV/B)
NIP. 19671117 200012 1 004

Pihak Pertama,
**PENATA KADASTRAL AHLI MUDA
SUB KOORD PEMBINAAN DAN
PENGENDALIAN ADM. PERTANAHAN**


YANI WARDHANA, S.Sos
PENATA TK.I/III.d
NIP.19680627 199403 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Tersedianya laporan hasil Telaah data perencanaan redistribusi tanah;	Jumlah laporan perencanaan redistribusi tanah	Dokumen	1
2	Tersedianya laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengolahan data pemantauan dan evaluasi hasil redistribusi tanah	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengolahan data pemantauan dan evaluasi hasil redistribusi tanah	dokumen	1
3	Tersedianya laporan hasil menyusun konsep keputusan redistribusi tanah	jumlah laporan hasil menyusun konsep keputusan redistribusi tanah	dokumen	1
4	Tersedianya laporan hasil Pengelolaan data inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	jumlah laporan hasil Pengelolaan data inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	dokumen	1
5	Tersedianya laporan hasil pelaksanaan identifikasi lapangan dalam rangka pengendalian dan pemantauan pertanahan	jumlah laporan hasil pelaksanaan identifikasi lapangan dalam rangka pengendalian dan pemantauan pertanahan	dokumen	1
6	Tersedianya laporan jadwal pelaksanaan pekerjaan survei	jumlah laporan jadwal pelaksanaan pekerjaan survei	dokumen	1
7	Tersedianya laporan hasil koordinasi dan penyuluhan kegiatan survei kadastral dengan unsur terkait	Jumlah laporan hasil koordinasi dan penyuluhan kegiatan survei kadastral dengan unsur terkait	dokumen	1

	kabupaten/kota	kabupaten/kota		
8	Tersedianya laporan kompilasi kegiatan pemetaan kadastral	jumlah laporan kompilasi kegiatan pemetaan kadastral	dokumen	1

TUGAS SEBAGAI SUB KOORDINATOR PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN ADM. PERTANAHAN

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti paling lambat 60 hari kerja	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
		Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Persen	100
2	Meningkatnya Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan sesuai dengan Tugas dan fungsi jabatan	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar	Persen	100
3	Terealisasinya Kegiatan Menimbulkan Utang Output Tanpa Potensi	Capaian Output Kegiatan	Persen	100

**PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Inventarisasi Subjek Dan Objek Redistribusi Tanah	Rp. 100.000.000	
2	Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) kabupaten/Kota	Rp. 100.000.000	
3	Koordinasi Penyelenggaraan Redtribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Rp. 100.000.000	
JUMLAH ANGGARAN		Rp.300.000.000,-	

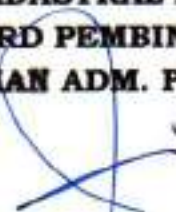
Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG PENGADAAN DAN
PENATAAN ADMINISTRASI
PERTANAHAN**



MOHAMAD DAHLAN,SH
PEMBINA TK 1 (IV/B)
NIP. 19671117 200012 1 004

Pihak Pertama,
**PENATA KADASTRAL AHLI MUDA
SUB KOORD PEMBINAAN DAN
PENGENDALIAN ADM. PERTANAHAN**



YANI WARDHANA, S.Sos
PENATA TK.I/III.d
NIP.19680627 199403 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **HAFAH. S.IP**

Jabatan : **PENATA KADASTRAL AHLI MUDA SUB KOORDINATOR
DATA DAN INFORMASI PERTANAHAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **MOHAMAD DAHLAN,SH**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PENGADAAN DAN PENATAAN
ADMINISTRASI PERTANAHAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Menyusun jadwal pelaksanaan pekerjaan terkait Data Pertanahan ;
2. Menyusun rancangan lokasi koordinasi dan inventarisasi Data Pertanahan
3. Melakukan koordinasi dan inventarisasi data pertanahan;
4. Menganalisis hasil inventarisasi data pertanahan;
5. Melaksanakan sinkronisasi data pertanahan;
6. Melakukan pengelolaan dan penyajian data pertanahan

Serta berjanji menjalankan tugas sebagai sebagai Sub Koordinator;

7. Mewujudkan target pada perjanjian kinerja dalam 1 (satu) Tahun Anggaran Sebagaimana Tertuang dalam Rencana Anggaran (Renja), serta dalam rangka mencapai target Kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan saya ;

8. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Inspektorat Daerah ;
9. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
10. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
11. Pemenuhan Ketersediaan Dta dan Informasi Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan;
12. Membuat Inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah;
13. Teralisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;
14. Melakukan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke pada pihak perangkat daerah;
15. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG PENGADAAN DAN
PENATAAN ADMINISTRASI
PERTANAHAN**



MOHAMAD DAHLAN, SH
PEMBINA TK.I (IV/B)
NIP. 19671117 200012 1 004

Pihak Pertama,
**PENATA KADASTRAL AHLI MUDA
SUB KOORDINATOR DATA DAN
INFORMASI PERTANAHAN**



HAFAH, S.I.P
PENATA TINGKAT I (III/D)
NIP. 19780820 200112 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Tersedianya laporan hasil pelaksanaan pekerjaan terkait Data dan Informasi Pertanahan	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan pekerjaan terkait Data Pertanahan	Laporan	1
2.	Tersedianya laporan lokasi Koordinasi dan Inventarisasi Data Pertanahan	Jumlah laporan lokasi koordinasi dan inventarisasi Data Pertanahan	Laporan	1
3.	Tersedianya laporan hasil koordinasi dan inventarisasi data pertanahan	Jumlah Laporan hasil koordinasi dan inventarisasi data pertanahan	Laporan	1
4.	Tersedianya laporan hasil analisis hasil inventarisasi penguasaan dan penggunaan tanah	Jumlah Laporan hasil analisis inventarisasi data pertanahan	Laporan	1
5.	Tersedianya laporan hasil sinkronisasi data pertanahan	Jumlah laporan hasil sinkronisasi data pertanahan	Laporan	1
6.	Tersedianya laporan hasil pengelolaan dan penyajian data pertanahan	Jumlah Laporan pengelolaan dan penyajian data pertanahan	Laporan	1

TUGAS SEBAGAI SUB KOORDINATOR DATA DAN INFORMASI PERTANAHAN

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Tersedianya Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi pemberian Izin Membuka Tanah dan/atau SKPT	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi pemberian Izin Membuka Tanah dan/atau SKPT	Dokumen	1

2	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti paling lambat 60 hari kerja	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
		Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Persen	100
3	Meningkatnya Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan sesuai dengan Tugas dan fungsi jabatan	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar	Persen	100
4	Terealisasinya Kegiatan Menimbulkan Utang Output Tanpa Potensi	Capaian Output Kegiatan	Persen	100

**PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH		
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	150,000,000	APBD
JUMLAH ANGGARAN		Rp. 150,000,000	APBD

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG PENGADAAN DAN
PENATAAN ADMINISTRASI
PERTANAHAN**



MOHAMAD DAHLAN, SH
PEMBINA TK.I (IV/B)
NIP. 19671117 200012 1 004

Pihak Pertama,
**PENATA KADASTRAL AHLI MUDA
SUB KOORDINATOR DATA DAN
INFORMASI PERTANAHAN**



HAFAH. S.IP
PENATA TINGKAT I (III/D)
NIP. 19780820 200112 2 003



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SUNARTO,SP.,MM.**

Jabatan : **KEPALA BIDANG SENGKETA TANAH**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SETIANTO NUGROHO AJI, SH., M.Si**

Jabatan : **KEPALA DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target pada perjanjian kinerja dalam 1 (satu) Tahun Anggaran Sebagaimana Tertuang dalam Rencana Anggaran (Renja), serta dalam rangka mencapai target Kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan saya ;
2. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Inspektorat Daerah ;
3. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
4. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
5. Pemenuhan Ketersediaan Dta dan Informasi Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan;
6. Membuat Inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah;
7. Teralisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;

8. Melakukan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke pada pihak perangkat daerah;
9. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,
**KEPALA DINAS
PERTANAHAN DAN PENATAAN
RUANG**

Pihak Pertama,
KABID SENGKETA TANAH



SETIANTO NUGROHO AJI, SH., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/C)
NIP. 19671027 199403 1 008



SUNARTO, SP., MM
PEMBINA TK.I (IV/B)
NIP. 19670223 199803 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya penataan, penguasaan, dan pemanfaatan pertanahan	Persentase Penanganan Sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Persen	80
2	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti paling lambat 60 hari kerja	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
		Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Persen	100
3	Meningkatnya Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan sesuai dengan Tugas dan fungsi jabatan	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar	Persen	100
4	Terealisasinya Kegiatan Menimbulkan Utang Output Tanpa Potensi	Capaian Output Kegiatan	Persen	100

**PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

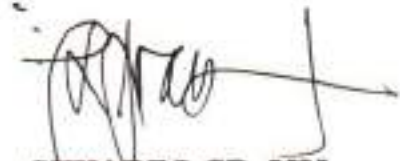
NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	275,000,000	APBD
1	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	275,000,000	APBD
JUMLAH ANGGARAN		275, 000,000	APBD

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,
**KEPALA DINAS
PERTANAHAN DAN PENATAAN
RUANG**


SETIANTO NUGROHO AJI, SH., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/C)
NIP. 19671027 199403 1 008

Pihak Pertama,
KABID SENGKETA TANAH


SUNARTO, SP., MM
PEMBINA TK.I (IV/B)
NIP. 19670223 199803 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MOHAMAD DAHLAN,SH.**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PENGADAAN DAN PENATAAN
ADMINISTRASI PERTANAHAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **MOHAMAD DAHLAN,SH**

Jabatan : **KEPALA BIDANG PENGADAAN DAN PENATAAN
ADMINISTRASI PERTANAHAN**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target pada perjanjian kinerja dalam 1 (satu) Tahun Anggaran Sebagaimana Tertuang dalam Rencana Anggaran (Renja), serta dalam rangka mencapai target Kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan saya ;
2. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Inspektorat Daerah ;
3. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
4. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
5. Pemenuhan Ketersediaan Dta dan Informasi Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan;
6. Membuat Inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah;

7. Teralisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;
8. Melakukan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke pada pihak perangkat daerah;
9. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG PENGADAAN DAN
PENATAAN ADMINISTRASI
PERTANAHAN**



MOHAMAD DAHLAN, SH
PEMBINA TK 1 (IV/B)
NIP. 19671117 200012 1 004

Pihak Pertama,
**KEPALA BIDANG PENGADAAN DAN
PENATAAN ADMINISTRASI
PERTANAHAN**



MOHAMAD DAHLAN, SH
PEMBINA TK 1 (IV/B)
NIP. 19671117 200012 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya penataan, penguasaan, dan pemanfaatan pertanahan	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Persen	70
2	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti paling lambat 60 hari kerja	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
		Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Persen	100
3	Meningkatnya Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan sesuai dengan Tugas dan fungsi jabatan	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar	Persen	100
4	Terealisasinya Kegiatan Menimbulkan Utang	Output Tanpa Potensi Capaian Output Kegiatan	Persen	100

**PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	250,000,000	APBD
1	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	250,000,000	APBD
JUMLAH ANGGARAN		Rp. 250,000,000.00	APBD

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,
**KEPALA BIDANG PENGADAAN DAN
PENATAAN ADMINISTRASI
PERTANAHAN**



MOHAMAD DAHLAN,SH
PEMBINA TINGKAT 1 (IV/B)
NIP. 19671117 200012 1 004

Pihak Pertama,
**KEPALA BIDANG PENGADAAN DAN
PENATAAN ADMINISTRASI
PERTANAHAN**



MOHAMAD DAHLAN,SH
PEMBINA TINGKAT 1 (IV/B)
NIP. 19671117 200012 1 004



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **H.IDIL ADHA, ST**

Jabatan : **PENYULUH HUKUM AHLI MUDA SELAKU SUB KOORD
PENYULUH PERTANAHAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SUNARTO,SP.,MM**

Jabatan : **KABID SENGKETA TANAH**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Melakukan Analisis Informasi Penanganan Pengaduan Pelayanan Pertanahan;
2. Menyusun Bahan Sosialisasi Pencegahan Penanganan Perkara Pertanahan Kepada stakeholder;
3. Menyusun Risalah Pengolahan data kasus pertanahan;

Serta berjanji menjalankan tugas sebagai Sub Koordinator Penyuluh Pertanahan

Mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai

Kartanegara pada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan saya;

1. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
2. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
3. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
4. Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan sesuai dengan Tugas dan fungsi jabatan;
5. Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah;
6. Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke pada kepala perangkat daerah;
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,
KABID SENGKETA TANAH



SUNARTO, SP., MM
PEMBINA TK.I (IV/B)
NIP. 19670223 199803 1 004

Pihak Pertama,
**PENYULUH HUKUM AHLI MUDA SELAKU
SUB KOORD PENYULUH PERTANAHAN**



H.IDIL ADHA, ST
PENATA (III/C)
NIP.19761202 201212 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Tersedianya Laporan hasil analisis informasi penanganan pengaduan pelayanan Pertanahan	Jumlah Laporan hasil analisis informasi penanganan pengaduan pelayanan pertanahan	Laporan	1
2	Tersedianya dokumen bahan sosialisasi pencegahan penanganan perkara pertanahan kepada stakeholder	Jumlah dokumen bahan sosialisasi pencegahan penanganan perkara pertanahan kepada stakeholder	Dokumen	1
3	Tersedianya laporan risalah pengolahan data kasus pertanahan	Jumlah laporan risalah pengolahan data kasus pertanahan	Laporan	1

TUGAS SEBAGAI SUB KOORDINATOR PENYULUH PERTANAHAN

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Tersedianya laporan hasil analisis informasi penanganan pengaduan pelayanan pertanahan	Jumlah Laporan hasil analisis informasi penanganan pengaduan pelayanan pertanahan	Laporan	1
2	Tersedianya dokumen bahan sosialisasi pencegahan penanganan perkara pertanahan kepada stakeholder	Jumlah dokumen bahan sosialisasi pencegahan penanganan perkara pertanahan kepada stakeholder	Dokumen	1
3	Tersedianya laporan risalah pengolahan data kasus pertanahan	Jumlah laporan risalah pengolahan data kasus pertanahan	Laporan	1

4	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti paling lambat 60 hari kerja	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
		Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Persen	100
5	Meningkatnya Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan sesuai dengan Tugas dan fungsi jabatan	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar	Persen	100
6	Terealisasinya Kegiatan Menimbulkan Utang Output Tanpa Potensi	Capaian Output Kegiatan	Persen	100

PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota		
1	Inventarisasi sengketa, konflik dan perkara pertanahan dalam satu daerah/kota	225,000,000	APBD
2	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.	50,000,000	APBD
JUMLAH ANGGARAN		Rp. 275,000,000	APBD

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,
KABID SENGKETA TANAH


SUNARTO, SP., MM
PEMBINA TK.I (IV/B)
NIP. 19670223 199803 1 004

Pihak Pertama,
PENYULUH HUKUM AHLI MUDA SELAKU
SUB KOORD PENYULUH PERTANAHAN


H.IDIL ADHA, ST
PENATA (III/C)
NIP.19761202 201212 1 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **AGUS SUGIANTO, SE**

Jabatan : **PENYULUH HUKUM AHLI MUDA SELAKU SUB
KOORDINATOR ADVOKASI DAN PENGENDALIAN
SENGKETA PERTANAHAN**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SUNARTO,SP.,MM**

Jabatan : **KABID SENKETA TANAH**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mengumpulkan data kegiatan identifikasi lapangan dalam rangka penanganan kasus pertanahan;
2. Melaksanakan identifikasi lapangan dalam rangka tumpang tindih penguasaan tanah;
3. Melakukan mediasi dalam kasus pertanahan;
4. Menghadiri sidang kasus pertanahan berdasarkan surat kuasa;
5. Menyusun bahan jawaban kasus pertanahan;
6. Menyusun telaahan tumpang tindih penguasaan tanah;

Serta berjanji menjalankan tugas sebagai Sub Koordinator:

7. Mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan saya;

8. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
9. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
10. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
11. Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan sesuai dengan Tugas dan fungsi jabatan;
12. Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah;
13. Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;
14. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke pada kepala perangkat daerah;
15. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,
KABID SENGKETA TANAH



SUNARTO, SP., MM
PEMBINA TK.1 (IV/B)
NIP. 19670223 199803 1 004

Pihak Pertama,
**PENYULUH HUKUM AHLI MUDA SELAKU SUB
KOORDINATOR ADVOKASI DAN
PENGENDALIAN SENGKETA PERTANAHAN**



AGUS SUGIANTO, SE
PENATA TK.1 (III/D)
NIP. 19740404 201001 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Tersedianya data kegiatan identifikasi lapangan dalam rangka penanganan kasus pertanahan;	Jumlah Laporan hasil data kegiatan identifikasi lapangan dalam rangka penanganan kasus pertanahan;	Laporan	1
2	Tersedianya identifikasi lapangan dalam rangka tumpang tindih penguasaan tanah	Jumlah dokumen identifikasi lapangan dalam rangka tumpang tindih penguasaan tanah	Dokumen	1
3	Terlaksananya mediasi dalam kasus pertanahan;	Jumlah laporan mediasi dalam kasus pertanahan	Laporan	1
4	Terlaksananya sidang kasus pertanahan berdasarkan surat kuasa	Jumlah Laporan sidang kasus pertanahan berdasarkan surat kuasa	Laporan	1
5	Tersedianya bahan jawaban kasus pertanahan	Jumlah Laporan bahan jawaban kasus pertanahan	Laporan	1
6	Tersedianya telaahan tumpang tindih penguasaan tanah	Jumlah Laporan telaahan tumpang tindih penguasaan tanah	Laporan	1

**TUGAS SEBAGAI SUB KOORDINATOR ADVOKASI DAN PENGENDALIAN
SENKETA PERTANAHAN**

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya penataan, penguasaan, dan pemanfaatan pertanahan	Persentase Penanganan Sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Persen	80
2	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti paling lambat 60 hari kerja	Persen	100
3		Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
4		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
5		Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Persen	100
6	Meningkatnya Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan sesuai dengan Tugas dan fungsi jabatan	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar	Persen	100
7	Terealisasinya Kegiatan Menimbulkan Utang	Output Tanpa Potensi Capaian Output Kegiatan	Persen	100

PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Rp.,-	APBD
	JUMLAH ANGGARAN	Rp.,-	APBD

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,
KABID SENGKETA TANAH



SUNARTO, SP. MM
PEMBINA TK.I (IV/B)
NIP. 19670223 199803 1 004

Pihak Pertama,
**PENYULUH HUKUM AHLI MUDA SELAKU SUB
KOORDINATOR ADVOKASI DAN
PENGENDALIAN SENGKETA PERTANAHAN**



AGUS SUGIANTO, SE
PENATA TK.I (III/D)
NIP.19740404 201001 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **YOVITA DWI ANDHINI,SH**

Jabatan : **PENATA KADASTRAL AHLI MUDA SELAKU SUB KOORD
PENGUATAN HAK ATAS TANAH**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SETIANTO NUGROHO AJI,SH.,M.Si**

Jabatan : **KEPALA DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Menyusun jadwal pelaksanaan pekerjaan Penguatan Hak Atas Tanah
2. melaksanakan kegiatan Pengukuran secara teknis maupun yuridis yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengolahan data, pengendalian, pembinaan, dan pelayanan informasi tentang pelaksanaan sertipikasi tanah-tanah Aset Pemda yang berada di Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. menyusun daftar lokasi,menyiapkan informasi dasar, melakukan koordinasi kegiatan survey kadastral dan Inventarisasi tanah-tanah Aset Pemerintah Daerah dengan unsur terkait Desa / Kelurahan dan Kecamatan
4. melakukan dokumentasi visual lokasi sampel survey kadastral dan mewawancara narasumber di lapangan dalam rangka mencari data fisik yuridis serta memverifikasi data fisik dan alas hak permohonan pengukuran bidang tanah disertai data pendukung.
5. melakukan pemeriksaan tanah dalam rangka pendaftaran tanah dan melakukan analisis hasil kegiatan pemeriksaan tanah serta melakukan verifikasi bahan usulan pengisian blanko sertipikat hak atas tanah.
6. melakukan telaahan dan pemeriksaan dokumen pendaftaran sertipikat hak pakai.

7. melakukan pengelolaan dan penyajian data pertanahan dan menganalisis data hasil peninjauan lapangan atau lokasi penguatan hak atas tanah dan menyusun konsep berita acara hasil peninjauan lapangan.
8. menganalisis data hasil peninjauan lapangan atau lokasi penguatan hak atas tanah dan menyusun konsep berita acara hasil peninjauan lapangan.

Serta berjanji menjalankan tugas sebagai Sub Koordinator:

9. Mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan saya;
10. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
11. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
12. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
13. Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan sesuai dengan Tugas dan fungsi jabatan;
14. Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah;
15. Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;
16. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke pada kepala perangkat daerah;
17. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;

2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,
**KEPALA DINAS
PERTANAHAN DAN PENATAAN
RUANG**



SETIANTO NUGROHO AJI, SH., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/C)
NIP. 19671027 199403 1 008

Pihak Pertama,
**PENATA KADASTRAL AHLI MUDA
SUB KOORD PENGUATAN HAK ATAS
TANAH**



YOVITA DWI ANDHINI, S.H
PENATA TK.1/III.d
NIP.19800107 201001 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Tersedianya laporan hasil pelaksanaan pekerjaan Penguatan Hak Atas Tanah	Jumlah laporan pekerjaan Penguatan Hak Atas Tanah	Dokumen	1
2	Tersedianya laporan hasil pelaksanaan kegiatan Pengukuran secara teknis maupun yuridis yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengolahan data, pengendalian, pembinaan, dan pelayanan informasi tentang pelaksanaan sertipikasi tanah-tanah Aset Pemda yang berada di Kabupaten Kutai Kartanegara.	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan Pengukuran secara teknis maupun yuridis yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengolahan data, pengendalian, pembinaan, dan pelayanan informasi tentang pelaksanaan sertipikasi tanah-tanah Aset Pemda yang berada di Kabupaten Kutai Kartanegara.	dokumen	1
3	Tersedianya laporan hasil menyusun daftar lokasi, menyiapkan informasi dasar, melakukan koordinasi kegiatan survey kadastral dan Inventarisasi tanah-tanah Aset Pemerintah Daerah dengan unsur terkait Desa / Kelurahan dan Kecamatan	jumlah laporan hasil menyusun daftar lokasi, menyiapkan informasi dasar, melakukan koordinasi kegiatan survey kadastral dan Inventarisasi tanah-tanah Aset Pemerintah Daerah dengan unsur terkait Desa / Kelurahan dan Kecamatan	dokumen	1

4	Tersedianya laporan hasil dokumentasi visual lokasi sampel survey kadastral dan mewawancara narasumber di lapangan dalam rangka mencari data fisik yuridis serta memverifikasi data fisik dan alas hak permohonan pengukuran bidang tanah disertai data pendukung.	jumlah laporan hasil dokumentasi visual lokasi sampel survey kadastral dan mewawancara narasumber di lapangan dalam rangka mencari data fisik yuridis serta memverifikasi data fisik dan alas hak permohonan pengukuran bidang tanah disertai data pendukung.	dokumen	1
5	Tersedianya laporan hasil pemeriksaan tanah dalam rangka pendaftaran tanah dan melakukan analisis hasil kegiatan pemeriksaan tanah serta melakukan verifikasi bahan usulan pengisian blanko sertifikat hak atas tanah.	jumlah laporan hasil pemeriksaan tanah dalam rangka pendaftaran tanah dan melakukan analisis hasil kegiatan pemeriksaan tanah serta melakukan verifikasi bahan usulan pengisian blanko sertifikat hak atas tanah.	dokumen	1
6	Tersedianya laporan hasil telaahan dan pemeriksaan dokumen pendaftaran sertifikat hak pakai.	jumlah laporan hasil telaahan dan pemeriksaan dokumen pendaftaran sertifikat hak pakai.	dokumen	1
7	Tersedianya laporan pengelolaan dan penyajian data pertanahan dan menganalisis data hasil peninjauan lapangan atau lokasi penguatan hak atas	Jumlah laporan hasil pengelolaan dan penyajian data pertanahan dan menganalisis data hasil peninjauan lapangan	dokumen	1

	tanah dan menyusun konsep berita acara hasil peninjauan lapangan.	atau lokasi penguatan hak atas tanah dan menyusun konsep berita acara hasil peninjauan lapangan.		
8	Tersedianya laporan analisis data hasil peninjauan lapangan atau lokasi penguatan hak atas tanah dan menyusun konsep berita acara hasil peninjauan lapangan.	jumlah laporan analisis data hasil peninjauan lapangan atau lokasi penguatan hak atas tanah dan menyusun konsep berita acara hasil peninjauan lapangan.	dokumen	1

TUGAS SEBAGAI SUB KOORDINATOR PENGUATAN HAK ATAS TANAH

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Tersedianya laporan hasil pelaksanaan kegiatan sertipikasi tanah aset pemerintah kabupaten	Meningkatnya legalitas tanah / sertipikat hak pakai tanah aset pemerintah daerah	Bidang tanah/ persil	100
2	Tersedianya laporan hasil pelaksanaan identifikasi dan pemetaan tanah aset pemerintah kabupaten	Meningkatnya data tanah aset daerah yang teridentifikasi	dokumen	1
3	Tersedianya surat klarifikasi lahan aset pemda	Meningkatnya klarifikasi lahan aset pemda	surat	30
4	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti paling lambat 60 hari kerja	Persen	100

		Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
		Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Persen	100
5	Meningkatnya Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan sesuai dengan Tugas dan fungsi jabatan	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar	Persen	100
6	Terealisasinya Kegiatan Menimbulkan Utang Output Tanpa Potensi	Capaian Output Kegiatan	Persen	100

**PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong subkegiatan pemanfaatan tanah kosong	Rp. 472.024.714,-	APBD
2	Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong subkegiatan pelaksanaan inventarisasi tanah kosong	Rp. 60.000.000,0	APBD
JUMLAH ANGGARAN		Rp.532.024.714,-	APBD

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,
**KEPALA DINAS
PERTANAHAN DAN PENATAAN
RUANG**



SETIANTO NUGROHO AJI, S.H., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/C)
NIP. 19671027 199403 1 008

Pihak Pertama,
**PENATA KADASTRAL AHLI MUDA
SUB KOORD PENGUATAN HAK ATAS
TANAH**



YOVITA DWI ANDHINI, S.H
PENATA TK.1/III.d
NIP.19800107 201001 2 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SITI AMINAH, S.Hut**

Jabatan : **PENATA KADASTERAL AHLI MUDA SUB KOORDINATOR
PENATAGUNAAN TANAH**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SETIANTO NUGROHO AJI, SH., M.Si**

Jabatan : **KEPALA DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Menyusun jadwal pekerjaan pelaksanaan pekerjaan penatagunaan Tanah;
2. Melaksanakan pekerjaan fasilitasi permohonan alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian, Rekomendasi Hak Guna Usaha oleh Bupati, persetujuan pemanfaatan dan penetapan lokasi untuk kepentingan umum;
3. Menyusun layout peta kerja dan rancangan kerja untuk survey lapangan;
4. Inventarisasi dan Identifikasi Data survey lapangan;
5. Melakukan koordinasi dan sosialisasi kegiatan survey kadasteral dengan unsur terkait kabupaten/kota;
6. Melakukan koordinasi dan sosialisasi kegiatan survey kadasteral dengan unsur terkait provinsi;
7. Mengolah data hasil survey identifikasi dan inventarisasi lapangan;
8. Mengolah Data dan menyajikan dalam bentuk dokumen;

9. Memformulasikan sajian untuk analisis hasil pekerjaan penatagunaan tanah;
10. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan penatagunaan tanah
11. Memperoleh sertifikasi yang sesuai dengan pekerjaan penatagunaan tanah
12. Mengajar/ melatih / membimbing yang berkaitan dengan bidang Penatagunaan Tanah;

Serta berjanji menjalankan tugas sebagai Sub Koordinator:

13. Mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini dalam 1 (satu) Tahun Ancaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan saya;
14. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Perneriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
15. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
16. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
17. Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan sesuai dengan Tugas dan fungsi jabatan;
18. Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penatagunaan tanah;
19. Terealisasinya Output Kegiatan tanpa menimbulkan potensi utang;
20. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja kepada kepala perangkat daerah;
21. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,
**KEPALA DINAS
PERTANAHAN DAN PENATAAN
RUANG**



SETIANTO NUGROHO AJI, SH., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19671027 199403 1 008

Pihak Pertama,
**PENATA KADASTERAL AHLI MUDA
SUB KOORDINATOR
PENATAGUNAAN TANAH**



SITI AMINAH, S.Hut
Penata Tingkat I, III/d
NIP. 19750726 200801 2 011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Tersusunnya jadwal pekerjaan pelaksanaan pekerjaan penatagunaan Tanah	Jumlah Laporan	Laporan	1
2	Terlaksananya pekerjaan fasilitasi permohonan alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian, Rekomendasi Hak Guna Usaha oleh Bupati, persetujuan pemanfaatan dan penetapan lokasi untuk kepentingan umum	Jumlah Laporan	Laporan	1
3	Tersusunnya layout peta kerja dan rancangan kerja untuk survey lapangan	Jumlah Laporan	Laporan	1
4	Tersusunnya Inventarisasi dan Identifikasi Data survey lapangan	Jumlah Laporan	Laporan	1
5	Terlaksananya koordinasi dan sosialisasi kegiatan survey kadasteral dengan unsur terkait kabupaten/kota	Jumlah Laporan	Laporan	1
6	Terlaksananya koordinasi dan sosialisasi kegiatan survey kadasteral dengan unsur terkait provinsi	Jumlah Laporan	Laporan	1
7	Tersusunnya data hasil survey identifikasi dan inventarisasi lapangan	Jumlah Laporan	Laporan	1

8	Tersusunnya Data dan menyajikan dalam bentuk dokumen	Jumlah Laporan	Laporan	1
9	Memformulasikan sajian untuk analisis hasil pekerjaan penatagunaan tanah	Jumlah Laporan	Laporan	1
10	Mengendalikan pelaksanaan kegiatan penatagunaan tanah	Jumlah Laporan	Laporan	1
11	Memperoleh sertifikasi yang sesuai dengan pekerjaan penatagunaan tanah	Jumlah Laporan	Laporan	1
12	Mengajar/ melatih / membimbing yang berkaitan dengan bidang Penatagunaan Tanah	Jumlah Laporan	Laporan	1

TUGAS SEBAGAI SUB KOORDINATOR PENATAGUNAAN TANAH

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Tersediannya Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	Dokumen	1
2	Tersediannya Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat	Dokumen	1

**PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
I	Program Pengelolaan Izin Lokasi	110.000.000	APBD
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	110.000.000	APBD
II	Program Penetapan Tanah Ulayat	75.000.000	APBD
	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000	APBD
JUMLAH ANGGARAN		185.000.000	APBD

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,
**KEPALA DINAS
PERTANAHAN DAN PENATAAN
RUANG**



SETIANTO NUGROHO AJI, SH., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19671027 199403 1 008

Pihak Pertama,
**PENATA KADASTERAL AHLI MUDA
SUB KOORDINATOR
PENATAGUNAAN TANAH**



SITI AMINAH, S.Hut
Penata Tingkat I, III/d
NIP. 19750726 200801 2 011



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **INDRA GUNAWAN, S.Hut. M.Si**

Jabatan : **PENATA KADASTRAL AHLI MUDA SELAKU SUB
KOORDINATOR DATA DAN PEMETAAN TEMATIK**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SETIANTO NUGROHO AJI, SH., M.Si**

Jabatan : **KEPALA DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

Melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Penata Kadastral Yaitu melaksanakan kegiatan Survey, Pengukuran, dan Pemetaan Kadastral secara Teknis maupun Yuridis yang terdiri dari Perencanaan, Pelaksanaan, Pengolahan Data, Pengendalian, Pembinaan dan Pelayanan Informasi

Serta berjanji menjalankan tugas sebagai Sub Koordinator Pemetaan dan Data Tematik :

Mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan saya;

1. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
2. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);

3. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
4. Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan sesuai dengan Tugas dan fungsi jabatan;
5. Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah;
6. Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;
7. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke pada kepala perangkat daerah;
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,
**KEPALA DINAS
PERTANAHAN DAN PENATAAN
RUANG**


SETIANTO NUGROHO AJI, S.H., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/C)
NIP. 19671027 199403 1 008

Pihak Pertama,
**PENATA KADASTRAL AHLI MUDA
SUB KOORD DATA PEMETAAN DAN
TEMATIK**


INDRA GUNAWAN, S.Hut. M.Si
PENATA (III/C)
NIP.19810627 201001 1012

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Menyusun jadwal pelaksanaan pekerjaan survey	Jumlah Laporan Pekerjaan Survey	Laporan	12
2	Melakukan Koordinasi dan penyuluhan kegiatan survey kadastral	Jumlah Laporan Penyuluhan Survey Kadastral	Laporan	12
3	Menelaah data dan informasi Bidang tanah pada lokasi sampel	Jumlah Laporan Data Informasi Bidang Tanah pada Lokasi Sampel	Laporan	12
4	Mengolah data hasil pengukuran Batas bidang	Jumlah Laporan Hasil Pengukuran Batas Bidang	Laporan	12
5.	Melakukan Digitasi dan Kompilasi Peta	Jumlah Laporan Digitasi dan Kompilasi Peta	Laporan	12

TUGAS SEBAGAI SUB KOORDINATOR DATA PEMETAAN DAN TEMATIK

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah laporan hasil kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Dokumen	1
2	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Laporan hasil kegiatan inventariasasi tanah kosong	Dokumen	1

3	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti paling lambat 60 hari kerja	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
		Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Persen	100
4	Meningkatnya Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan sesuai dengan Tugas dan fungsi jabatan	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar	Persen	100
5	Terealisasinya Kegiatan Menimbulkan Utang Output Tanpa Potensi	Capaian Output Kegiatan	Persen	100

**PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Koordinasi dan Sinkronasi Penyelesaian Tanah Kosong didalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 60.000.000,-	APBD
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Rp. 100.000.000,-	APBD
JUMLAH ANGGARAN		Rp.160.000.000,-	APBD

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,
**KEPALA DINAS
PERTANAHAN DAN PENATAAN
RUANG**



SETIANTO NUGROHO AJI,SH.,M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/C)
NIP. 19671027 199403 1 008

Pihak Pertama,
**PENATA KADASTRAL AHLI MUDA
SUB KOORD DATA PEMETAAN DAN
TEMATIK**



INDRA GUNAWAN,S.Hut.M.Si
PENATA (III/C)
NIP.19810627 201001 1012



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **EDY SANTOSO,SE,MP.**

Jabatan : **KEPALA BIDANG TATA RUANG**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SETIANTO NUGROHO AJI, SH., M.Si**

Jabatan : **KEPALA DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target pada perjanjian kinerja dalam 1 (satu) Tahun Anggaran Sebagaimana Tertuang dalam Rencana Anggaran (Renja), serta dalam rangka mencapai target Kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan saya ;
2. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Inspektorat Daerah ;
3. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
4. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
5. Pemenuhan Ketersediaan Dta dan Informasi Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan;
6. Membuat Inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah;
7. Teralisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;

8. Melakukan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke pada pihak perangkat daerah;
9. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,
**KEPALA DINAS
PERTANAHAN DAN PENATAAN
RUANG**



SETIANTO NUGROHO AJI, SH., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/C)
NIP. 19671027 199403 1 008

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG TATA RUANG



EDY SANTOSO, SE, MP.
PEMBINA (IV/A)
NIP. 19680615 199303 1 011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Pembangunan dan Pemanfaatan sesuai Arahana Pola Ruang	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	Persen	65
2	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti paling lambat 60 hari kerja	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
		Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Persen	100
3	Meningkatnya Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan sesuai dengan Tugas dan fungsi jabatan	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar	Persen	100
4	Terealisasinya Kegiatan Menimbulkan Utang Output Tanpa Potensi	Capaian Output Kegiatan	Persen	100

**PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		
1	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	730,000,000	APBD
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	485,000,000	APBD
3	Koordinasi dan Sinkronisas Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	120,000,000	APBD
4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	485,000,000	APBD
JUMLAH ANGGARAN		1,820, 000,000.00	APBD

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,
**KEPALA DINAS
PERTANAHAN DAN PENATAAN
RUANG**

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG TATA RUANG


SETIANTO NUGROHO AJI,SH.,M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/C)
NIP. 19671027 199403 1 008


EDY SANTOSO,SE,MP.
PEMBINA (IV/A)
NIP. 19680615 199303 1 011



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **H.TONNY HIDAYAT,ST,M.Si**

Jabatan : **PENATA RUANG AHLI MUDA SUB KOORDINATOR
PEMANFAATAN & PENGENDALIAN TATA RUANG**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **EDY SANTOSO,SE,MP.**

Jabatan : **KEPALA BIDANG TATA RUANG**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. mengolah dan menganalisis data dan informasi pengaturan pengendalian pemanfaatan ruang;
2. menyusun kriteria penetapan pemberian insentif dan disinsentif bidang penataan ruang;
3. mengolah dan menganalisis data dan informasi pengaturan penertiban pemanfaatan ruang;
4. menyusun telaahan dalam pembahasan teknis konsep materi teknis pengaturan penertiban pemanfaatan ruang;
5. menyusun hasil koordinasi penyelenggaraan penataan ruang;

Serta berjanji menjalankan tugas sebagai sebagai Sub Koordinator Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang;

6. Mewujudkan target pada perjanjian kinerja dalam 1 (satu) Tahun Anggaran Sebagaimana Tertuang dalam Rencana Anggaran (Renja), serta dalam rangka mencapai target Kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan saya ;

7. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Inspektorat Daerah ;
8. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
9. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
10. Pemenuhan Ketersediaan Dta dan Informasi Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan;
11. Membuat Inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah;
12. Teralisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;
13. Melakukan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke pada pihak perangkat daerah;
14. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG TATA RUANG


EDY SANTOSO, SE, MP.
PEMBINA (IV/A)
NIP. 19680615 199303 1 011

Pihak Pertama,
**PENATA RUANG AHLI MUDA SUB
KOORDINATOR PEMANFAATAN &
PENGENDALIAN TATA RUANG**


H. TONNY HIDAYAT, ST, M. Si
PEMBINA (IV/A)
NIP. 19771009 200502 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Tersedianya laporan hasil pemberian izin pemanfaatan ruang	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan pekerjaan terkait pemberian izin pemanfaatan ruang	Laporan	1
2.	Tersedianya laporan hasil kajian insentif dan disinsentif bidang penataan ruang	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pekerjaan insentif dan disinsentif bidang penataan ruang	Laporan	1
3.	Tersedianya laporan hasil analisis penertiban pemanfaatan ruang	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan penertiban pemanfaatan ruang	Laporan	1
4.	Tersedianya laporan hasil pembahasan pengaturan penertiban pemanfaatan ruang	Jumlah Laporan hasil pembahasan pengaturan penertiban pemanfaatan ruang	Laporan	1
5.	Tersedianya laporan hasil koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	Jumlah laporan hasil koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	Laporan	1

TUGAS SEBAGAI SUB KOORDINATOR PEMANFAATAN & PENGENDALIAN TATA RUANG

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Tersedianya laporan hasil pemberian izin pemanfaatan ruang	Jumlah Dokumen Hasil Tersedianya laporan hasil pemberian izin dan keterangan pemanfaatan ruang (PKKPR)	Dokumen	1
2	Tersedianya laporan hasil kajian insentif dan disinsentif bidang penataan ruang	Jumlah Dokumen Hasil hasil kajian insentif dan disinsentif bidang penataan ruang	Dokumen	1
3	Tersedianya laporan hasil analisis penertiban pemanfaatan ruang	Jumlah Dokumen Hasil analisis penertiban pemanfaatan ruang	Dokumen	1

4	Tersedianya laporan hasil pembahasan pengaturan penertiban pemanfaatan ruang	Jumlah Dokumen hasil analisis penertiban pemanfaatan ruang	Dokumen	1
5	Tersedianya laporan hasil koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	Jumlah Dokumen penyelenggaraan penataan ruang	Dokumen	1
6	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti paling lambat 60 hari kerja	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
		Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Persen	100
7	Meningkatnya Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan sesuai dengan Tugas dan fungsi jabatan	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar	Persen	100
8	Terealisasinya Kegiatan Menimbulkan Utang Output Tanpa Potensi	Capaian Output Kegiatan	Persen	100

**PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

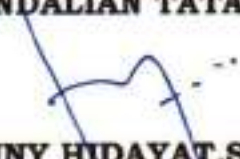
NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	200,000,000	APBD
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	65,000,000	APBD
3	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	150,000,000	APBD
4	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	70,000,000	APBD
JUMLAH ANGGARAN		Rp. 485,000,000	APBD

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG TATA RUANG


EDY SANTOSO, SE, MP.
PEMBINA (IV/A)
NIP. 19680615 199303 1 011

Pihak Pertama,
**PENATA RUANG AHLI MUDA SUB
KOORDINATOR PEMANFAATAN &
PENGENDALIAN TATA RUANG**


H. TONNY HIDAYAT, ST, M. Si
PEMBINA (IV/A)
NIP. 19771009 200502 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **YUDO ARIWINANTO,ST**

Jabatan : **PENATA RUANG AHLI MUDA SUB KOORDINATOR
PERENCANAAN TATA RUANG**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **EDY SANTOSO,SE,MP.**

Jabatan : **KEPALA BIDANG TATA RUANG**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. menyusun kriteria dan ketentuan peraturan zonasi;
2. menyusun konsep materi teknis pengaturan rencana tata ruang;
3. menyusun telaahan dalam pembahasan teknis konsep materi teknis pengaturan rencana tata ruang;
4. menyusun substansi teknis pengaturan rencana tata ruang;
5. menyusun telaahan terhadap substansi teknis dalam pembahasan rancangan peraturan pengaturan rencana tata ruang;
6. menyusun hasil koordinasi penyelenggaraan penataan ruang;
7. menyusun prosiding hasil koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.

Serta berjanji menjalankan tugas sebagai sebagai Sub Koordinator;

8. Mewujudkan target pada perjanjian kinerja dalam 1 (satu) Tahun Anggaran Sebagaimana Tertuang dalam Rencana Anggaran (Renja), serta dalam rangka mencapai target Kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan saya ;

9. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Inspektorat Daerah ;
10. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
11. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
12. Pemenuhan Ketersediaan Dta dan Informasi Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan;
13. Membuat Inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah;
14. Teralisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;
15. Melakukan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke pada pihak perangkat daerah;
16. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

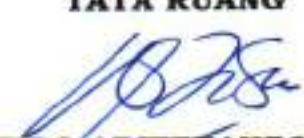
Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG TATA RUANG


EDY SANTOSO, SE, MP.
PEMBINA (IV/A)
NIP. 19680615 199303 1 011

Pihak Pertama,
**PENATA RUANG AHLI MUDA SUB
KOORDINATOR PERENCANAAN
TATA RUANG**


YUDO ARIWINANTO, ST
PENATA TINGKAT I (III/D)
NIP. 19820617 201101 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Tersedianya laporan hasil analisis kriteria dan ketentuan peraturan zonasi	Jumlah Laporan hasil analisis kriteria dan ketentuan peraturan zonasi	Laporan	1
2.	Tersedianya Dokumen materi teknis pengaturan rencana tata ruang	Jumlah Dokumen materi teknis pengaturan rencana tata ruang	Dokumen	1
3.	Tersedianya laporan hasil telaahan dalam pembahasan teknis konsep materi teknis pengaturan rencana tata ruang	Jumlah Laporan hasil telaahan dalam pembahasan teknis konsep materi teknis pengaturan rencana tata ruang	Laporan	1
4.	Tersedianya substansi teknis pengaturan rencana tata ruang	Jumlah Laporan hasil substansi teknis pengaturan rencana tata ruang	Laporan	1
5.	Tersedianya laporan hasil telaahan terhadap substansi teknis dalam pembahasan rancangan peraturan pengaturan rencana tata ruang	Jumlah laporan hasil telaahan terhadap substansi teknis dalam pembahasan rancangan peraturan pengaturan rencana tata ruang	Laporan	1
6	Tersedianya laporan hasil koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	Jumlah laporan hasil koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	Laporan	1
7	Tersedianya Dokumen prosiding hasil koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.	Jumlah Dokumen prosiding hasil koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.	Dokumen	1

TUGAS SEBAGAI SUB KOORDINATOR PERENCANAAN TATA RUANG

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Tersedianya laporan hasil analisis kriteria dan ketentuan peraturan zonasi	Jumlah Laporan hasil analisis kriteria dan ketentuan peraturan zonasi	Laporan	1
2	Tersedianya Dokumen materi teknis pengaturan rencana tata ruang	Jumlah Dokumen materi teknis pengaturan rencana tata ruang	Dokumen	1
3	Tersedianya laporan hasil telaahan dalam pembahasan teknis konsep materi teknis pengaturan rencana tata ruang	Jumlah Laporan hasil telaahan dalam pembahasan teknis konsep materi teknis pengaturan rencana tata ruang	Laporan	1
4	Tersedianya substansi teknis pengaturan rencana tata ruang	Jumlah Laporan hasil substansi teknis pengaturan rencana tata ruang	Laporan	1
5	Tersedianya laporan hasil telaahan terhadap substansi teknis dalam pembahasan rancangan peraturan pengaturan rencana tata ruang	Jumlah laporan hasil telaahan terhadap substansi teknis dalam pembahasan rancangan peraturan pengaturan rencana tata ruang	Laporan	1
6	Tersedianya laporan hasil koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	Jumlah laporan hasil koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	Laporan	1
7	Tersedianya Dokumen prosiding hasil koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.	Jumlah Dokumen prosiding hasil koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.	Dokumen	1

8	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti paling lambat 60 hari kerja	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
		Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Persen	100
9	Meningkatnya Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan sesuai dengan Tugas dan fungsi jabatan	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar	Persen	100
10	Terealisasinya Kegiatan Menimbulkan Utang Output Tanpa Potensi	Capaian Output Kegiatan	Persen	100

**PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	730,000,000	APBD
1	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	150,000,000	APBD
2	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	580,000,000	APBD
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	485,000,000	APBD
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	485,000,000	APBD
	JUMLAH ANGGARAN	Rp. 1,215,000,000	APBD

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG TATA RUANG


EDY SANTOSO, SE, MP.
PEMBINA (IV/A)
NIP. 19680615 199303 1 011

Pihak Pertama,
**PENATA RUANG AHLI MUDA SUB
KOORDINATOR PERENCANAAN
TATA RUANG**


YUDO ARIWINANTO, ST
PENATA TINGKAT I (III/D)
NIP. 19820617 201101 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **H.M.FACHROMI,ST**

Jabatan : **PENATA RUANG AHLI MUDA SUB KOORDINATOR
PEMETAAN TATA RUANG**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **EDY SANTOSO,SE,MP.**

Jabatan : **KEPALA BIDANG TATA RUANG**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Menyusun Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang;
2. Tersedianya Dokumen materi teknis pengaturan rencana tata ruang;
3. Merumuskan kajian dalam rangka koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan penataan ruang;
4. Mengembangkan model penyebarluasan informasi Penyelenggaraan Penataan Ruang;
5. Melakukan kegiatan pengembangan model koordinasi penyelenggaraan penataan ruang;
6. Melakukan kegiatan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang;
7. Tersedianya Dokumen prosiding hasil koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.

Serta berjanji menjalankan tugas sebagai sebagai Sub Koordinator;

8. Mewujudkan target pada perjanjian kinerja dalam 1 (satu) Tahun Anggaran Sebagaimana Tertuang dalam Rencana Anggaran (Renja), serta dalam rangka mencapai target Kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun

2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara pada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan saya ;

9. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Inspektorat Daerah ;
10. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
11. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;
12. Pemenuhan Ketersediaan Dta dan Informasi Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan;
13. Membuat Inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah;
14. Teralisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;
15. Melakukan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke pada pihak perangkat daerah;
16. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2021

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG TATA RUANG


EDY SANTOSO, SE, MP.
PEMBINA (IV/A)
NIP. 196806151993031000

Pihak Pertama,
**PENATA RUANG AHLI MUDA SUB
KOORDINATOR PEMETAAN
TATA RUANG**


H.M. FACHROM, ST
PENATA TINGKAT I (III/D)
NIP. 19811108 200604 1 012

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Menyusun Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Laporan hasil Koordinasi	Laporan	1
2.	Tersedianya Dokumen materi teknis pengaturan rencana tata ruang	Jumlah Dokumen materi teknis pengaturan rencana tata ruang	Dokumen	1
3.	Merumuskan kajian dalam rangka koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan penataan ruang	Jumlah Laporan hasil telaahan dalam koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan penataan ruang	Laporan	1
4.	Mengembangkan model penyebaran informasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Laporan hasil substansi teknis dalam pengembangan model informasi penataan ruang	Laporan	1
5.	Melakukan kegiatan pengembangan model koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	Jumlah laporan hasil telaahan terhadap substansi teknis dalam pengembangan model koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	Laporan	1
6	Melakukan kegiatan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah laporan hasil evaluasi koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	Laporan	1
7	Tersedianya Dokumen prosiding hasil koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.	Jumlah Dokumen prosiding hasil koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.	Dokumen	1

TUGAS SEBAGAI SUB KOORDINATOR PERENCANAAN TATA RUANG

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Menyusun Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Laporan hasil Koordinasi	Laporan	1
2	Tersedianya Dokumen materi teknis pengaturan rencana tata ruang	Jumlah Dokumen materi teknis pengaturan rencana tata ruang	Dokumen	1
3	Merumuskan kajian dalam rangka koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan penataan ruang	Jumlah Laporan hasil telaahan dalam koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan penataan ruang	Laporan	1
4	Mengembangkan model penyebarluasan informasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Laporan hasil substansi teknis dalam pengembangan model informasi penataan ruang	Laporan	1
5	Melakukan kegiatan pengembangan model koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	Jumlah laporan hasil telaahan terhadap substansi teknis dalam pengembangan model koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	Laporan	1
6	Melakukan kegiatan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah laporan hasil evaluasi koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	Laporan	1
7	Tersedianya Dokumen prosiding hasil koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.	Jumlah Dokumen prosiding hasil koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.	Dokumen	1

8	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti paling lambat 60 hari kerja	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
		Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Persen	100
9	Meningkatnya Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan sesuai dengan Tugas dan fungsi jabatan	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar	Persen	100
10	Terealisasinya Kegiatan Menimbulkan Utang Output Tanpa Potensi	Capaian Output Kegiatan	Persen	100

**PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	210,000,000	
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Untuk Invetasi Daerah Kabupaten/Kota	150,000,000	
2	Sistem Informasi Penataan Ruang	60,000,000	
JUMLAH ANGGARAN		Rp. 210,000,000	

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2021

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG TATA RUANG


EDY SANTOSO, SE, MP.
PEMBINA (IV/A)
NIP. 196806151993031000

Pihak Pertama,
**PENATA RUANG AHLI MUDA SUB
KOORDINATOR PEMETAAN
TATA RUANG**


H.M. FACHROMI, ST
PENATA TINGKAT I (III/D)
NIP. 19811108 200604 1 012



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ANI NURAINI,A.Md**
Jabatan : **Bendahara Pengeluaran**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **INDRA WAHYUNI,SP**

Jabatan : **Perencana Ahli Muda selaku Sub Koord Penyusun Program dan Keuangan**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mengelola uang/ surat berharga/ barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk bahan pertanggungjawaban
2. Mengajukan surat permintaan pembayaran ke KPKN berdasarkan surat perintah untuk mengurus keuangan;
3. Mengurus surat perintah membayar uang SPM Giro berdasarkan prosedur yang berlaku untuk penerimaan uang;
4. Melakukan pembayaran atas tagihan-tagihan berdasarkan surat dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
5. Melayani permintaan uang muka berdasarkan surat perintah untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
6. Mencatat, menyusun penerimaan dan pengeluaran uang di dalam formulir daftar penerimaan dan pengeluaran yang telah ditetapkan sesuai prosedur yang berlaku untuk bahan lampiran laporan;
7. Membuat laporan mengenai permintaan, pengeluaran dan keadaan kas berdasarkan penerimaan dan pengeluaran sebagai bahan pertanggungjawaban;

8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik tertulis maupun lisan
9. Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya

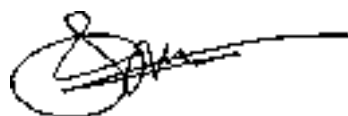
Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

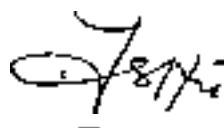
Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,
**Perencana Ahli Muda Selaku Sub
Kood Penyusunan Progrsm dan
Keuangan**



INDRA WAHYUNI,SP
Penata TK. I/III c
NIP. 19780617 200801 2 023

Pihak Pertama,
Bendahara Pengeluaran,



ANI NURAINI, A.Md
Penata Muda TK. I/ II b
NIP. 197209212007012020

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	Jumlah Administrasi Keuangan yang dilaksanakan meliputi Kegiatan Rutin	Dokumen	150
2	Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Jumlah Pencatatan dan Penyusunan Penerimaan dan Pengeluaran Uang dalam formulir yang di tetapkan	Dokumen	4
3	Persentase Ketersediaan Informasi yang di butuhkan untuk perumusan Alternatif kebijakan	Jumlah Pelaporan mengenai permintaan, pengeluaran dan keadaan kas berdasarkan penerimaan dan pengeluaran	Dokumen	4
4	Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,
Perencana Ahli Muda Selaku Sub
Kood Penyusunan Progrsm dan
Keuangan



INDRA WAHYUNI,SP
 Penata TK. I/III c
 NIP. 19780617 200801 2 023

Pihak Pertama,
Bendahara Pengeluaran,



ANI NURAINI,A.Md
 Penata Muda TK. I/ II b
 NIP. 197209212007012020



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **DEBBI VINARTI**
Jabatan : **Verifikator Keuangan**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **INDRA WAHYUNI,SP**
Jabatan : **Perencana Ahli Muda selaku Sub Koord Penyusun Program dan Keuangan**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Menerima dan menyortir bukti-bukti pengeluaran dan penerimaan serta Buku Kas untuk disusun sesuai dengan mata anggaran agar mempermudah dalam pemeriksaan/ penelitian
2. Meneliti dan mencocokkan bukti-bukti pengeluaran dan penerimaan dengan laporan realisasi keuangan dan Buku Kas agar diketahui apakah telah sesuai dengan peruntukannya
3. Melakukan pemeriksaan terhadap alat-alat bukti apakah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Melaporkan hasil temuan pemeriksaan kepada atasan untuk memperoleh tindak lanjut sebagai bahan laporan pimpinan; dan
5. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik tertulis maupun lisan
6. Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
7. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Terwujudnya Tertib Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen Keuangan yang telah di serahkan untuk di verifikasi	Dokumen	50
2	Terlaksananya Pengelolaan Arsip Dokumen Keuangan	Jumlah Arsip dan dokumen keuangan yang terkelola dan telah diarsipkan	Dokumen	100
3	Terlaksananya layanan data dan informasi yang terkait dengan verifikasi Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan yang terverifikasi	Dokumen	50
4	Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,
Perencana Ahli Muda Selaku Sub
Kood Penyusunan Progrsm dan
Keuangan



INDRA WAHYUNI,SP
 Penata TK. I/III c
 NIP. 19780617 200801 2 023

Pihak Pertama,
Verifikator Keuangan,



DEBBI VINARTI
 Pengatur Muda TK. I/ II d
 NIP. 19800916 200901 2 002

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,
**Perencana Ahli Muda Selaku Sub
Kood Penyusunan Progrsm dan
Keuangan,**



INDRA WAHYUNI, SP
Penata TK. I/III c
NIP. 19780617 200801 2 023

Pihak Pertama,
Verifikator Keuanganm,



DEBBI VINARTI
Pengatur Muda TK. I/ II d
NIP. 19800916 200901 2 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ENI OKTAVIANI**
Jabatan : **Pranata Kearsipan**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SYAIFUL ANWAR, S.Sos**
Jabatan : **Kepala Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mengumpulkan bahan/Surat
2. Mengolah Bahan/ arsip menjadi materi
3. Mengevaluasi hasil Kerja
4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban
5. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan
6. Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
7. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,
**Kepala Sub Bagian Umum dan
Ketatalaksanaan**



SYAIFUL ANWAR, S.Sos
Penata TK. I/III d
NIP. 197106192001121001

Pihak Pertama,
Pranata Kearsipan,



ENI OKTAVIANTI
Penata Muda/ III a
NIP. 197701082006042015

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Terwujudnya tertib Adminitrasi Surat menyurat	Mengarsipkan Surat (Perdus arsip/minimal 10 sd 15 Berkas Surat)	Dokumen	400
		Memelihara Arsip/dokumen kuno (Per 1 dus dokumen arsip)	Dokumen	400
		Memelihara Arsip/dokumen aktif (masih digunakan) Per 1 dus dokumen arsip)	Dokumen	400
2	Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,
**Kepala Sub Bagian Umum dan
Ketatalaksanaan**



SYAIFUL ANWAR, S.Sos
Penata TK. I/III d
NIP. 197106192001121001

Pihak Pertama,
Pranata Kearsipan,



ENI OKTAVIANTI
Penata Muda/ III a
NIP. 197701082006042015



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ERIKA HERDIYANTI**
Jabatan : **Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SYAIFUL ANWAR,S.Sos**
Jabatan : **Kepala Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Menyusun program kerja, bahan dan alat perlengkapan urusan pengelola pemanfaatan BMD sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik.
2. Memantau, kegiatan urusan pengelola pemanfaatan BMD sesuai dengan bidang tugasnya, agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal;
3. Mengendalikan program kerja kegiatan urusan pengelola pemanfaatan BMD, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan
4. Mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaannya, agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal;
5. Mengevaluasi dan menyusun laporan kegiatan urusan pengelola pemanfaatan BMD secara berkala, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya; dan
6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara tertulis maupun lisan

7. Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,
**Kepala Sub Bagian Umum
dan Ketatalaksanaan**



SYAIFUL ANWAR, S.Sos
Penata TK. I/III d
NIP. 197106192001121001

Pihak Pertama,
**Pengelola Pemanfaatan Barang
Milik Daerah ,**



ERIKA HERDIYANTI
Pengatur / II c
NIP. 19910115201101200

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Tersedianya Jumlah data Pemanfaatan BMD	Jumlah data terkait BMD	Dokumen	50
		Persentase keakuratan data yang tersedia	Dokumen	100
		Ketepatan waktu Pengelolaan Barang Daerah	Dokumen	6
2	Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,
**Kepala Sub Bagian Umum
dan Ketatalaksanaan**



SYAIFUL ANWAR, S.Sos
Penata TK. I/III d
NIP. 197106192001121001

Pihak Pertama,
**Pengelola Pemanfaatan Barang
Milik Daerah ,**



ERIKA HERDIYANTI
Pengatur / II c
NIP. 19910115201101200



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hj. FATIMAH.S.Sos**
Jabatan : **Pengadministrasi Umum**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SYAIFUL ANWAR,S.Sos**
Jabatan : **Kepala Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Menerima, mencatat, dan menyortir surat masuk, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pencarian.
2. Memberi lembar pengantar pada surat, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pengendalian;
3. Mengelompokkan surat atau dokumen menurut jenis dan sifatnya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pendistribusian;
4. Mendokumentasikan surat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tertib
5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban; dan
6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan.
7. Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,
**Kepala Sub Bagian Umum dan
Ketatalaksanaan**



SYAIFUL ANWAR, S.Sos
Penata TK. I/III d
NIP. 197106192001121001

Pihak Pertama,
Pengadministrasi Umum,



Hj. FATIMAH S.Sos
Penata Muda/ III a
NIP. 19811212200312220

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Terwujudnya tertib Adminitrasi Surat menyurat	Jumlah Surat yang terkelola dan telah tersampaikan	Dokumen	400
		Persentase Surat masuk yang telah tersampaikan	Dokumen	100
		Ketepatan waktu dalam pengarsipan Surat Masuk	Dokumen	6
2	Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,
**Kepala Sub Bagian Umum dan
Ketatalaksanaan**



SYAIFUL ANWAR, S.Sos
Penata TK. I/III d
NIP. 197106192001121001

Pihak Pertama,
Pengadministasi Umum,



Hj. FATIMAH S.Sos
Penata Muda/ III a
NIP. 19811212200312220



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **FINDA ANGGARENI**

Jabatan : **Pengolah Data**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **INDRA WAHYUNI,SP**

Jabatan : **Perencana Ahli Muda selaku Sub Koord Penyusun Program dan Keuangan**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Menyusun program kerja, bahan dan alat perlengkapan urusan Program dan Keuangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik;
2. Memantau, kegiatan urusan Program dan Keuangan sesuai dengan bidang tugasnya, agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal
3. Mengendalikan program kerja kegiatan urusan Program dan Keuangan , sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan;
4. Mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaannya, agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal
5. Mengevaluasi dan menyusun laporan kegiatan urusan Program dan Keuangan secara berkala, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya; dan
6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara tertulis maupun lisan

7. Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,
**Perencana Ahli Muda Selaku Sub
Kood Penyusunan Progrsm dan
Keuangan**



INDRA WAHYUNI, SP
Penata TK. I/III c
NIP. 19780617 200801 2 023

Pihak Pertama,
Pengolah Data



FINDA ANGGRAENI
Pengatur TK. I/ II d
NIP. 19840128 200902 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Terwujudnya Tertib Administrasi Keuangan	Jumlah laporan dan Analisa Laporan urusan perencanaan dan Evaluasi Pelaporan	Dokumen	12
2	Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,
**Perencana Ahli Muda Selaku Sub
Kood Penyusunan Progrsm dan
Keuangan**



INDRA WAHYUNI, SP
Penata TK. I/III c
NIP. 19780617 200801 2 023

Pihak Pertama,
Pengolah Data



FINDA ANGGRAENI
Pengatur TK. I/ II d
NIP. 19840128 200902 2 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **FITRA WARDANA**

Jabatan : **Pengolah Data**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Hj. AJI NURUL AISYAH, S. Sos**

Jabatan : **Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda Selaku Sub Koord Kepegawaian**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Menyusun program kerja, bahan dan alat perlengkapan urusan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik;
2. Memantau, kegiatan urusan Kepegawaian sesuai dengan bidang tugasnya, agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal
3. Mengendalikan program kerja kegiatan urusan Kepegawaian, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan;
4. Mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaannya, agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal
5. Mengevaluasi dan menyusun laporan kegiatan urusan Kepegawaian secara berkala, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya; dan
6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara tertulis maupun lisan

7. Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.

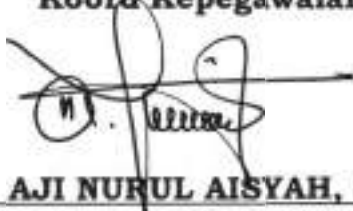
Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,
**Analisis Sumber Daya Manusia
Aparatur Ahli Muda Selaku Sub
Koordinator Kepegawaian**



HJ. AJI NURUL AISYAH, S. Sos
Penata Tk. I, III/d
NIP. 196709252000122002

Pihak Pertama,
Pengolah Data



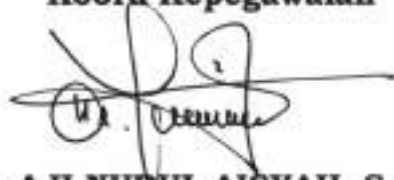
FITRA WARDANA
Pengatur Tingkat I/II.d
NIP. 198307122010011017

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
(NAMA PERANGKAT DAERAH)
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Tersedianya Data untuk Pelaksanaan Kegiatan urusan Sub Bagian Kepegawaian;	Jumlah Data Kepegawaian	Data	200
2.	Terlaksananya Program kerja Kegiatan urusan Sub Bagian Kepegawaian;	Jumlah Berkas Kepegawaian	Berkas	100
3.	Terlaksananya Koordinasi dengan unit-unit terkait atau instansi lain terkait urusan Sub Bagian Kepegawaian;	Jumlah Laporan/Tindak Lanjut Koordinasi	Laporan/Tindak Lanjut Koordinasi	30
2.	Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,
Analisis Sumber Daya Manusia
Aparatur Ahli Muda Selaku Sub
Koord Kepegawaian



Hj. AJI NURUL AISYAH, S. Sos
 Penata Tk. I, III/d
 NIP. 196709252000122002

Pihak Pertama,
Pengolah Data



FITRA WARDANA
 Pengatur Tingkat I/II.d
 NIP. 198307122010011017



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **INDRA NURHIDAYAT**
Jabatan : **Pengadministrasi Keuangan**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **INDRA WAHYUNI,SP**
Jabatan : **Perencana Ahli Muda selaku Sub Koord Penyusun Program dan Keuangan**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Menerima, mencatat, dan menyortir surat masuk, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pencarian.
2. Memberi lembar pengantar pada surat, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pengendalian;
3. Mengelompokkan surat atau dokumen menurut jenis dan sifatnya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pendistribusian;
4. Mendokumentasikan surat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tertib
5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban; dan
6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan.
7. Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya

Pihak kedua:

9. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
10. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,
**Perencana Ahli Muda Selaku Sub
Kood Penyusunan Progrsm dan
Keuangan**



INDRA WAHYUNI,SP
Penata TK. I/III c
NIP. 19780617 200801 2 023

Pihak Pertama,
Pengadministrasi Keuangan



INDRA NURHIDAYAT
Pengatur Muda TK. I/ II b
NIP. 19850927012121003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Terwujudnya Administrasi urusan Program dan Keuangan	Jumlah dokumen administrasi program dan keuangan yang telah di kelola	Dokumen	100
2	Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,
**Perencana Ahli Muda Selaku Sub
Kood Penyusunan Progrsm dan
Keuangan**



INDRA WAHYUNI,SP
Penata TK. I/III c
NIP. 19780617 200801 2 023

Pihak Pertama,
Pengadministrasi Keuangan



INDRA NURHIDAYAT
Pengatur Muda TK. I/ II b
NIP. 19850927012121003



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **KARTINIWATI**
Jabatan : **Pengelola Daftar Gaji**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **INDRA WAHYUNI,SP**

Jabatan : **Perencana Ahli Muda selaku Sub Koord Penyusun Program dan Keuangan**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Menyusun program kerja, bahan dan alat perlengkapan objek kerja sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik
2. Memantau, objek kerja sesuai dengan bidang tugasnya, agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal;
3. Mengendalikan program kerja, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan;
4. Mengkordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaannya, agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil optimal;
5. Mengevaluasi dan menyusun laporan secara berkala, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya, dan
6. Melaksanakantugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik tertulis maupun lisan

7. Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

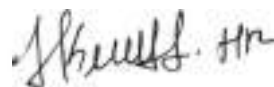
Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,
**Perencana Ahli Muda Selaku Sub
Kood Penyusunan Progrsm dan
Keuangan**



INDRA WAHYUNI,SP
Penata TK. I/III c
NIP. 19780617 200801 2 023

Pihak Pertama,
Pengelola Daftar Gaji,



KARTINIWATI
Pengatur Muda TK. I/ II d
NIP. 19800916 200901 2 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Tersedianya Gaji dan Tunjangan bagi ASN	Gaji dan Tunjangan Bagi	Dokumen	76
2	Tersedianya data Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan	Jumlah Berkas penerimaan dan Pengeluaran yang telah di kerjakan	Dokumen	100
3	Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,
**Perencana Ahli Muda Selaku Sub
Kood Penyusunan Progrsm dan
Keuangan**



INDRA WAHYUNI,SP
Penata TK. I/III c
NIP. 19780617 200801 2 023

Pihak Pertama,
Pengelola Daftar Gaji,



KARTINIWATI
Pengatur Muda TK. I/ II d
NIP. 19800916 200901 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **LELY MAHDALENA**

Jabatan : **Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **INDRA WAHYUNI,SP**

Jabatan : **Perencana Ahli Muda selaku Sub Koord Penyusun Program dan Keuangan**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Menerima dan memeriksa bahan dan data objek kerja sesuai prosedur sebagai bahan kajian dalam rangka penyusunan Objek kerja.
2. Menyusun konsep penyusunan objek kerja sesuai dengan hasil kajian dan prosedur untuk tercapainya sasaran yang di harapkan.
3. Mengevaluasi proses penyusunan objek kerja sesuai prosedur sebagai bahan perbaikan dan kesempurnaan tercapainya sasaran.
4. Mengumpulkan dan mengklasifikasikan bahan dan data objek kerja sesuai Spesifik dan prosedur untuk memudahkan apabila di perlukan.
5. Mempelajari dan mengkaji karakteristik, spesifikasi dan hal hal yang terkait dengan objek kerja sesuai prosedur dalam rangka penyusunan objek kerja.
6. Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
7. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAR GET
1.	Tersedianya Laporan Hasil Pengolahan data dan Informasi	Jumlah Laporan hasil pengolahan data dan informasi	Laporan	1
2.	Tersedianya laporan Pelaksanaan Pengumpulan data	Jumlah Lapran Hasil pelaksanaan Pengumpulan data	Laporan	1
3	Tersedianya Laporan hasil Analisis data dan Informasi	Jumlah Laporan hasil analisis data dan Informasi	Laporan	1
4	Tersedianya laporan hasil penyajian data dan informasi	Jumlah Laporan penyajikan data dan Informasi	Laporan	1
5	Tersedianya Rancangan Rencana Anggaran dan Pembiayaan Pembangunan	Jumlah rancangan Rencana Anggaran dan pembiayaan pembangunan	Rancangan	1
6	Tersedianya laporan Persiapan Pengendalian Pelaksanaan Rencana	Jumlah Laporan Persiapan Pengendalian Pelaksanaan Rencana	Laporan	1
7	Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,
**Perencana Ahli Muda Selaku Sub
Kood Penyusunan Progrsm dan
Keuangan**



INDRA WAHYUNI, SP
Penata TK. I/III c
NIP. 19780617 200801 2 023

Pihak Pertama,
**Penyusun Program Anggaran dan
Pelaporan,**



LELY MAHDALENA
Penata Muda TK. I/ III b
NIP. 19650812 198703 2 014

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,
**Perencana Ahli Muda Selaku Sub
Kood Penyusunan Progrsm dan
Keuangan**



INDRA WAHYUNI,SP
Penata TK. I/III c
NIP. 19780617 200801 2 023

Pihak Pertama,
**Penyusun Program Anggaran dan
Pelaporan,**



LELY MAHDALENA
Penata Muda TK. I/ III b
NIP. 19650812 198703 2 014



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MERLINA**

Jabatan : **Pengelola Kepegawaian**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Hj. AJI NURUL AISYAH,S.Sos**

Jabatan : **Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda Selaku
Sub Koord Kepegawaian**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Menyusun program kerja, bahan dan alat perlengkapan obyek kerja sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik;
2. Memantau, objek kerja sesuai dengan bidang tugasnya, agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal;
3. Mengendalikan program kerja, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan;
4. Mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaannya, agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal;

5. Mengevaluasi dan menyusun laporan secara berkala, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya;
6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.
7. Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,
Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur
Ahli Muda Selaku Sub Koord
Kepegawaian



Hj. AJI NURUL AISYAH, S.Sos
Penata TK. I/III d
NIP. 19670925 200012 2 002

Pihak Pertama,
Pengelola Kepegawaian



MERLINA
Pengatur TK. I/ II d
NIP. 198007142009022003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

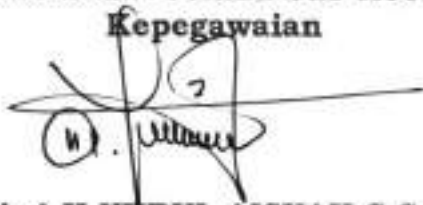
NO	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Terlaksanya proses pelaksanaan program kerja pada Sub Bagian kepegawaian terkait data	Jumlah Administrasi Permohonan Surat Cuti;	Dokumen	20
		Jumlah Laporan LHKPN;	Dokumen	19
		Jumlah Laporan LHKASN;	Dokumen	47
		Jumlah Permohonan Satya Lencana;	Berkas	3
2.	Terlaksananya koordinasi dengan unit-unit terkait dalam rangka pelaksanaan program terpadu untuk mencapai hasil yang optimal;	Jumlah rapat /koordinasi yang dihadiri dengan unit - unit terkait	Laporan	30
3.	Terciptanya secara berkala, bahan penyusunan program berikutnya;	Data Evaluasi Jabatan, Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dan Kompilasi Perjanjian Kinerja;	Berkas	66
		Jumlah data berkas usulan karis/karsu, Askes, Karpeg, Pemberian Sanksi, Pengembangan Kompetensi Kepegawaian;	Berkas	71

6.	Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
----	---	---	--------	-----

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,

**Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur
Ahli Muda Selaku Sub Koord
Kepegawaian**



Hj. AJI NURUL AISYAH, S.Sos
Penata TK. I/III d
NIP. 19670925 200012 2 002

Pihak Pertama,
Pengelola Kepegawaian,



MERLINA
Pengatur TK. I/ II d
NIP. 198007142009022003



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **NURJANI**
Jabatan : **Pengolah Data**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SYAIFUL ANWAR, S.Sos**
Jabatan : **Kepala Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mengumpulkan dan Memeriksa Data-data Umum dan Ketatalaksanaan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pelaksanaan kegiatan;
2. Menganalisis Data-data Umum dan Ketatalaksanaan yang terkait dengan kegiatan untuk menghasilkan kebenaran informasi;
3. Menyusun Rekapitulasi Data-data Umum dan Ketatalaksanaan yang terkait dengan Kegiatan penyusunan berkas dokumen kepegawaian;
4. Mengolah dan menyajikan data-data Umum dan Ketatalaksanaan ke dalam bentuk yang telah ditetapkan sebagai bahan proses lebih lanjut;
5. Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
6. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,
**Kepala Sub Bagian Umum dan
Ketatalaksanaan**



SYAIFUL ANWAR, S.Sos
Penata TK. I/III d
NIP. 197106192001121001

Pihak Pertama,
Pengolah Data ,



NURJANI
Pengatur Tingkat I/ III d
NIP. 197511182002121003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Terwujudnya tertib Adminitrasi Surat menyurat	Jumlah pengolahan data untuk keperluan Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan	Dokumen	50
		Persentase kelengkapan data yang tersedia	Dokumen	85
		Ketepatan waktu Penyelesaian	Dokumen	6
2	Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan



SYAIFUL ANWAR, S.Sos
Penata TK. I/III d
NIP. 197106192001121001

Pihak Pertama,
Pengolah Data ,



NURJANI
Pengatur Tingkat I/ II d
NIP. 17511182002121003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **RONNY ADI WIJAYA. S. Sos**

Jabatan : **Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SYAIFUL ANWAR, S. Sos**

Jabatan : **Kepala Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Menerima dan memeriksa bahan dan data urusan penyusun kebutuhan barang inventaris sesuai prosedur sebagai bahan kajian dalam rangka penyusunan urusan penyusun kebutuhan barang inventaris;
2. Mengumpulkan dan mengklasifikasikan bahan dan data urusan penyusun kebutuhan barang inventaris sesuai spesifikasi dan prosedur untuk memudahkan apabila diperlukan
3. Mempelajari dan mengkaji karakteristik, spesifikasi dan hal-hal yang terkait dengan urusan penyusun kebutuhan barang inventaris sesuai prosedur dalam rangka urusan penyusunan kebutuhan barang inventaris;
4. Menyusun konsep penyusunan urusan penyusun kebutuhan barang inventaris sesuai dengan hasil kajian dan prosedur untuk tercapainya sasaran yang diharapkan;
5. Mendiskusikan konsep penyusunan urusan penyusun kebutuhan barang inventaris dengan pejabat yang berwenang dan terkait sesuai prosedur untuk kesempurnaan penyusunan urusan penyusun kebutuhan barang inventaris;
6. Menyusun kembali obyek kerja berdasarkan hasil diskusi sesuai prosedur untuk kelancaran dan optimalisasi penyusunan urusan penyusun kebutuhan barang inventaris

7. Mengevaluasi proses penyusunan urusan penyusun kebutuhan barang inventaris sesuai prosedur sebagai bahan perbaikan dan kesempurnaan tercapainya sasaran
8. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban; dan
9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik tertulis maupun lisan
10. Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
11. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,
**Kepala Sub Bagian Umum
dan Ketatalaksanaan**



SYAIFUL ANWAR, S. Sos
Penata TK. I/III d
NIP. 197106192001121001

Pihak Pertama,
**Penyusun Kebutuhan Barang
Inventaris ,**



RONNY ADI WIJAYA. S. Sos
Penata Tingkat I/ III d
NIP. 197409212000121001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Tersedianya data kebutuhan barang Inventaris	Jumlah data dan barang kebutuhan Inventaris	Dokumen	200
		Persentase kelengkapan data dan barang Inventaris	Dokumen	100
		Ketepatan waktu dalam penyajian data dan Barang inventaris	Dokumen	6
2	Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,
**Kepala Sub Bagian Umum
dan Ketatalaksanaan**



SYAIFUL ANWAR, S.Sos
Penata TK. I/III d
NIP. 197106192001121001

Pihak Pertama,
**Penyusun Kebutuhan Barang
Inventaris ,**

RONNY ADI WIJAYA. S. Sos
Penata Tingkat I/ III d
NIP. 197409212000121001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SURYANINGSIH**

Jabatan : **Pengelola Kepegawaian**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Hj. AJI NURUL AISYAH, S.Sos**

Jabatan : **Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda Sub
Koordinator Kepegawaian**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Menyusun program kerja, bahan dan alat perlengkapan obyek kerja sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik;
2. Memantau, objek kerja sesuai dengan bidang tugasnya, agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal;
3. Mengendalikan program kerja, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan;
4. Mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaannya, agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal;

5. Mengevaluasi dan menyusun laporan secara berkala, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya;
6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.
7. Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,
**Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur
Ahli Muda Sub-Koord kepegawaian**



Hj. AJI NURUL AISYAH, S.Sos
Penata TK. I/III d
NIP. 19670925 200012 2 002

Pihak Pertama,
Pengelola Kepegawaian,



SURYANINGSIH
Pengatur TK. I/ II d
NIP. 19770326 200701 2 015

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Terlaksananya Pengelolaan Program Kerja Sub Bagian Kepegawaian;	Jumlah Laporan/Berkas Terkait Urusan Sub Bagian Kepegawaian	Laporan/Berkas	200
2.	Terlaksananya Koordinasi dengan unit-unit terkait perihal Urusan Sub Bagian Kepegawaian;	Jumlah Berkas/Tindak Lanjut Koordinasi	Berkas/Tindak Lanjut Koordinasi	100
3.	Tersedianya Laporan terkait Program Kegiatan yang dilaksanakan pada Sub Bagian Kepegawaian;	Jumlah Laporan Kegiatan	Laporan	6
2.	Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,
Analisis Sumber Daya Manusia
Aparatur Ahli Muda Selaku Sub
Koord Kepegawaian



HJ. AJI NURUL AISYAH, S.Sos
 Penata TK. I/III d
 NIP. 19670925 200012 2 002

Pihak Pertama,
Pengelola Kepegawaian,



SURYANINGSIH
 Pengatur TK. I/ II d
 NIP. 198007142009022003



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **AISYAH**

Jabatan : **Penyusun Pembinaan Keagrariaan**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **YANI WARDHANA, S.Sos**

Jabatan : **Penata Kadastral Ahli Muda Selaku Sub Koord Pembinaan Dan Pengendalian Adm. Pertanahan**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Menerima dan memeriksa bahan dan data urusan Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan sesuai prosedur sebagai bahan kajian dalam rangka penyusunan urusan Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan ;
2. Mengumpulkan dan mengklasifikasikan bahan dan data urusan Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan sesuai spesifikasi dan prosedur untuk memudahkan apabila diperlukan;
3. Mempelajari dan mengkaji karakteristik, spesifikasi dan hal-hal yang terkait dengan urusan Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan sesuai prosedur dalam rangka pengurusan urusan Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan ;
4. Menyusun konsep penyusunan urusan Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan sesuai dengan hasil kajian dan prosedur untuk tercapainya sasaran yang diharapkan;

5. Mendiskusikan konsep penyusunan urusan Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan dengan pejabat yang berwenang dan terkait sesuai prosedur untuk kesempurnaan penyusunan urusan Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan ;
6. Menyusun kembali obyek kerja berdasarkan hasil diskusi sesuai prosedur untuk kelancaran dan optimalisasi penyusunan urusan Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan ;
7. Mengevaluasi proses penyusunan urusan Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan sesuai prosedur sebagai bahan perbaikan dan kesempurnaan tercapainya sasaran;
8. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban; dan
9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik tertulis maupun lisan

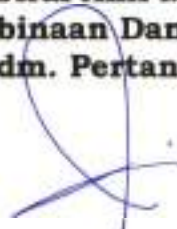
Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,
**Penata Kadastral Ahli Muda Selaku Sub
Koord Pembinaan Dan Pengendalian
Adm. Pertanahan**


YANI WARDHANA, S.Sos
Penata TK. I / III d
NIP. 19680627 199403 1 004

Pihak Pertama,
**Penyusun Pembinaan
Keagrariaan,**


AISYAH
Penata Muda TK. I/ III b
NIP. 19700127 199203 2 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Terlaksananya Proses Pengumpulan Bahan dan Data yang terklasifikasi dan dikaji karakteristik, spesifikasi dalam rangka Pengurusan urusan Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan ;	Jumlah Bahan dan data yang terkumpul dan telah terklasifikasi terkait urusan Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan	Data/ bahan	50
2.	Terlaksananya penyusunan Konsep urusan Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan ;	Jumlah Laporan/dokumen penyusunan Konsep urusan Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan ;	Laporan/ Dokumen	30
3.	Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban; dan	Jumlah Laporan harian terkait pelaksanaan tugas	Laporan	252
4.	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik tertulis maupun lisan	Jumlah Laporan/dokumen kedinasan terkait urusan Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan ;	Laporan/ dokumen	20
5.	Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,
**Penata Kadastral Ahli Muda Selaku Sub
Koord Pembinaan Dan Pengendalian
Adm. Pertanahan**



YANI WARDHANA, S.Sos
Penata TK. I / III d
NIP. 19680627 199403 1 004

Pihak Pertama,
**Penyusun Pembinaan
Keagrariaan,**



AISYAH
Penata Muda TK. I/ III b
NIP. 19700127 199203 2 009



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **EMY HERLINDA, SH**

Jabatan : **Pemeriksa Pertanahan**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **MOHAMAD DAHLAN, SH**

Jabatan : **Kabid. Pengadaan Tanah dan Penataan Administrasi Pertanahan**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mencatat dan Menghitung obyek kerja yang diserahkan dari pejabat yang berwenang, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar obyek kerja yang diperiksa dapat diketahui jumlahnya;
2. Menginventarisir permasalahan obyek kerja yang diberikan dari pejabat yang berwenang, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar obyek kerja dapat diketahui permasalahannya;
3. Mengelompokkan obyek kerja menurut jenis dan sifat permasalahannya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pemeriksaan;
4. Melakukan pemeriksaan obyek kerja, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar mendapatkan temuan sesuai dengan yang diharapkan;
5. Melaporkan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;

6. Melakukan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan petunjuk atasan baik tertulis maupun lisan;

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,
**Kabid. Pengadaan Tanah dan Penataan
Administrasi Pertanahan**



MOHAMAD DAHLAN, SH
Pembina TK. I /IV b
NIP. 19671117 200012 1 004

Pihak Pertama,
Pemeriksa Pertanahan,



EMY HERLINDA, SH
Penata TK. I/ III d
NIP. 19771016 201001 2 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Tersedianya data pencatatan dan perhitungan yang telah terinventarisir dari Laporan masuk yang sesuai urusan fasilitasi pengadaan tanah;	Jumlah data yang masuk pada seksi fasilitasi pengadaan tanah	Data	50
2.	Terlaksananya pemeriksaan data urusan fasilitasi pengadaan tanah, agar mendapatkan temuan sesuai dengan yang diharapkan;	Jumlah data yang terverifikasi	Data	50
3.	Tersedianya laporan Pelaksanaan Kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pertanggung jawaban;	Jumlah Laporan harian terkait pelaksanaan tugas	Laporan	252
4.	Terlaksananya laporan/hasil tindak lanjut dari perintah atasan;	Jumlah laporan/hasil tindak lanjut	Laporan	30
5.	Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,
Kabid. Pengadaan Tanah dan Penataan
Administrasi Pertanahan



MOHAMAD DAHLAN, SH
Pembina TK. I /IV b
NIP. 19671117 200012 1 004

Pihak Pertama,
Pemeriksa Pertanahan,



EMY HERLINDA, SH
Penata TK. I/ III d
NIP. 19771016 201001 2 005



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **HENNY KESUMAWATI, SE**

Jabatan : **Pengelola Pengadaan Tanah**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **MOHAMAD DAHLAN, SH**

Jabatan : **Kabid. Pengadaan Tanah dan Penataan Administrasi
Pertanahan**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Menyusun program kerja, bahan dan alat perlengkapan urusan Fasilitasi Pengadaan Tanah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik;
2. Memantau, kegiatan urusan Fasilitasi Pengadaan Tanah sesuai dengan bidang tugasnya, agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal;
3. Mengendalikan program kerja kegiatan urusan Fasilitasi Pengadaan Tanah, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan;
4. Mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaannya, agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal;
5. Mengevaluasi dan menyusun laporan kegiatan urusan Pengadaan Tanah secara berkala, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang

berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya; dan

6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara tertulis maupun lisan.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,
**Kabid. Pengadaan Tanah dan Penataan
Administrasi Pertanahan**



MOHAMAD DAHLAN, SH
Pembina TK. I / IV b
NIP. 19671117 200012 1 004

Pihak Pertama,
Pengelola Pengadaan Tanah,



HENNY KESUMAWATI, SE
Penata TK. I/ III d
NIP. 19731114 200502 2 005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Terlaksananya perencanaan Kegiatan urusan Fasilitasi Pengadaan Tanah;	Jumlah dokumen perencanaan	Dokumen	30
2.	Terlaksananya kegiatan program kerja urusan Fasilitasi Pengadaan Tanah sesuai dengan perencanaan;	Jumlah Dokumen/Laporan Kegiatan	Dokumen /Laporan kegiatan	30
3.	Terlaksananya Proses koordinasi terkait urusan Fasilitasi Pengadaan Tanah;	Jumlah Laporan/tindak lanjut koordinasi	Laporan/tindak lanjut koordinasi	30
4.	Tersedianya laporan kegiatan hasil evaluasi secara berkala;	Jumlah Laporan Kegiatan	Laporan kegiatan	30
5.	Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,
**Kabid. Pengadaan Tanah dan Penataan
Administrasi Pertanahan**

Pihak Pertama,
Pengelola Pengadaan Tanah,


MOHAMAD DAHLAN, SH
Pembina TK. I / IV b
NIP. 19671117 200012 1 004


HENNY KESUMAWATI, SE
Penata TK. I/ III d
NIP. 19731114 200502 2 005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SAFRUDIN**

Jabatan : **Pengelola Administrasi Pertanahan Desa Atau Kelurahan**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **YANI WARDHANA, S.Sos**

Jabatan : **Penata Kadastro Ahli Muda Selaku Sub Koord Pembinaan Dan Pengendalian Adm. Pertanahan**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Menyusun program kerja, bahan dan alat perlengkapan urusan pembinaan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik;
2. Memantau, kegiatan urusan Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan sesuai dengan bidang tugasnya, agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal;
3. Mengendalikan program kerja kegiatan urusan Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan , sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan;
4. Mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaannya, agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal;

5. Mengevaluasi dan menyusun laporan kegiatan urusan Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan secara berkala, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya; dan

6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik secara tertulis maupun lisan.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
 2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
- Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,
**Penata Kadastral Ahli Muda Selaku Sub
Koord Pembinaan Dan Pengendalian
Adm. Pertanahan**

YANI WARDHANA, S.Sos
Penata TK. I / III d
NIP. 19680627 199403 1 004

Pihak Pertama,
**Pengelola Administrasi
Pertanahan Desa Atau Kelurahan,**

SARFUDIN
Pengatur TK. I / II d
NIP. 19770823 200701 1 014

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Terlaksananya proses pelaksanaan kegiatan program kerja urusan Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Pertanian;	Jumlah Laporan/dokumen pelaksanaan kegiatan	Laporan/Dokumen	30
2.	Terlaksananya koordinasi dengan unit-unit terkait atau instansi lain untuk pelaksanaan program secara optimal;	Jumlah Laporan/tindak lanjut koordinasi	Laporan/tindak lanjut koordinasi	30
3.	Terlaksananya proses evaluasi dan penyusunan Laporan kegiatan urusan Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Pertanian;	Jumlah Laporan/dokumen Evaluasi dan penyusunan kegiatan	Laporan/dokumen	30
4.	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara tertulis maupun lisan;	Jumlah Laporan/dokumen kedinasaan terkait urusan Pembinaan dan Administrasi Pertanian ;	Laporan/dokumen	20
5.	Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Pertama,
Pengelola Administrasi
Pertanahan Desa Atau Kelurahan,



SAFRUDIN

Pengatur TK. I / II d
NIP. 19770823 200701 1 014

Pihak Kedua,
Penata Kadastral Ahli Muda Selaku Sub
Koord Pembinaan Dan Pengendalian
Adm. Pertanahan



YANI WARDHANA, S.Sos

Penata TK. I / III d
NIP. 19680627 199403 1 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SAHIRIN MOBLY**

Jabatan : **Pengolah Data**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **MOHAMAD DAHLAN, SH**

Jabatan : **Kabid. Pengadaan Tanah dan Penataan Administrasi
Pertanahan**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mempelajari pedoman dan petunjuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui macam, metode dan teknik dalam mengolah obyek kerja;
2. Mengumpulkan dan memeriksa data sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan kegiatan berdasarkan jenis dan obyek kerja;
3. Menganalisis obyek kerja sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk menghasilkan kebenaran informasi dan volume kegiatan berdasarkan laporan yang masuk;
4. Menyusun rekapitulasi kegiatan berdasarkan jenis obyek kerja yang masuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui volume dan jenis obyek kerja yang akan diolah;
5. Melaporkan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;

6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan;
7. Mencatat perkembangan dan permasalahan obyek kerja secara periodik sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui langkah pemecahannya;
8. Mengolah dan menyajikan obyek kerja dalam bentuk yang telah ditetapkan sebagai bahan proses lebih lanjut.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,
**Kabid. Pengadaan Tanah dan Penataan
Administrasi Pertanahan**



MOHAMAD DAHLAN, SH
Pembina TK. I /IV b
NIP. 19671117 200012 1 004

Pihak Pertama,
Pengolah Data,

SAHIRIN MOBLY
Pengatur Muda TK. I/ II b
NIP. 19760519 201001 1 017

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Terlaksananya perencanaan dalam kegiatan urusan fasilitasi pengadaan tanah;	Jumlah dokumen perencanaan	Dokumen	2
2.	Tersedianya data yang teranalisis untuk pelaksanaan kegiatan urusan fasilitasi pengadaan tanah;	Jumlah data yang telah terkumpul dan diperiksa serta dianalisis sesuai dengan keperluan urusan fasilitasi pengadaan tanah	Data	100
3.	Tersedianya rekap kegiatan urusan fasilitasi pengadaan tanah;	Jumlah Laporan Kegiatan	Laporan	50
4.	Tersedianya laporan Pelaksanaan Kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pertanggung jawaban;	Jumlah Laporan harian terkait pelaksanaan tugas	Laporan	252
5.	Terlaksananya laporan/hasil tindak lanjut dari perintah atasan;	Jumlah laporan/hasil tindak lanjut	Laporan	30
6.	Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,
**Kabid. Pengadaan Tanah dan Penataan
Administrasi Pertanahan**



MOHAMAD DAHLAN, SH
Pembina TK. I /IV b
NIP. 19671117 200012 1 004

Pihak Pertama,
Pengolah Data,



SAHIRIN MOBLY
Pengatur Muda TK. I/ II b
NIP. 19760519 201001 1 017



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SURIANSYAH**

Jabatan : **Pengelola Data**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **HAFSAH, S.IP**

Jabatan : **Penata Kadastral Ahli Muda Sub Koordinator Data dan Informasi Pertanahan**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Menyusun program kerja, bahan dan alat perlengkapan urusan seksi data dan informasi pertanahan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik;
2. Memantau kegiatan urusan data dan informasi pertanahan sesuai dengan bidang tugasnya, agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal;
3. Mengendalikan program kerja, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan;
4. Mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaannya, agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal;
5. Mengevaluasi dan menyusun laporan secara berkala, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya; dan

6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara tertulis maupun lisan.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,
**Penata Kadastral Ahli Muda Sub
Koordinator Data dan Informasi
Pertanahan**


HAFAH, S.IP

Penata TK. I / III d
NIP. 19780820 200112 2 003

Pihak Pertama,
Pengelola Data,


SURIANSYAH

Penata Muda TK. I/ III b
NIP. 19681202 200012 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Tersedianya dokumen terkait kegiatan urusan seksi data dan informasi pertanahan;	Jumlah dokumen Kegiatan urusan seksi data dan informasi pertanahan	Dokumen	30
2.	Terlaksananya kegiatan sesuai dengan perencanaan awal dalam urusan seksi data dan informasi pertanahan;	Jumlah Dokumen/Laporan Kegiatan	Dokumen /Laporan kegiatan	30
3.	Terlaksananya Proses koordinasi terkait urusan seksi data dan informasi pertanahan;	Jumlah Laporan/tindak lanjut koordinasi	Laporan/tindak lanjut koordinasi	30
4.	Tersedianya laporan kegiatan hasil evaluasi secara berkala;	Jumlah Laporan Kegiatan	Laporan kegiatan	30
5.	Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,
Penata Kadastral Ahli Muda Sub Koordinator Data dan Informasi Pertanahan


HAFSAH, S.IP

Penata TK. I / III d
 NIP. 19780820 200112 2 003

Pihak Pertama,
Pengelola Data,


SURIANSYAH

Penata Muda TK. I/ III b
 NIP. 19681202 200012 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **TANG I BI S. Sos**

Jabatan : **Pengadministrasi Pertanahan**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **HAFSAH, S.IP**

Jabatan : **Penata Kadastral Ahli Muda Sub Koordinator Data dan Informasi Pertanahan**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Menerima, mencatat dan menyortir surat masuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pencarian;
2. Memberi lembar pengantar pada surat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pengendalian
3. Mengelompokkan surat atau dokumen menurut jenis dan sifatnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pendistribusian;
4. Mendokumentasikan surat masuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi;
5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggung jawaban; dan
6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan;

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,
**Penata Kadastral Ahli Muda Sub
Koordinator Data dan Informasi
Pertanahan**



HAHSAH, S.IP

Penata TK. I / III d
NIP. 19780820 200112 2 003

Pihak Pertama,
Pengadministrasi Pertanahan,



TANG I BI, S. Sos

Penata Muda TK. I/ III b
NIP. 19780316 200112 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Tersedianya data surat masuk yang telah melalui proses administrasi;	Jumlah surat masuk yang telah di proses	Surat masuk	30
2.	Tersedianya dokumen surat masuk yang telah dipilah dan di dokumentasikan;	Jumlah surat masuk yang telah di proses	Dokumen / surat masuk	30
3.	Tersedianya laporan Pelaksanaan Tugas kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pertanggung jawaban;	Jumlah Laporan harian terkait pelaksanaan tugas	Laporan	252
4.	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara tertulis maupun lisan;	Jumlah Laporan/dokumen kedinasan terkait urusan Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan ;	Laporan/ dokumen	20
5.	Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,
Penata Kadastral Ahli Muda Sub Koordinator Data dan Informasi Pertanahan


HAFAH, S.IP

Penata TK. I / III d
NIP. 19780820 200112 2 003

Pihak Pertama,
Pengadministrasi Pertanahan,


TANG I BI, S. Sos

Penata Muda TK. I/ III b
NIP. 19780316 200112 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **WINA MARLINI, SE**

Jabatan : **Pengolah Data**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **HAFAH, S.IP**

Jabatan : **Penata Kadastral Ahli Muda Sub Koordinator Data dan Informasi Pertanahan**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mempelajari pedoman dan petunjuk pembuatan Data Base Pertanahan;
2. Mengumpulkan dan memeriksa data dari Kecamatan sebagai bahan kegiatan;
3. Menganalisis Data dan Informasi Pertanahan berdasarkan laporan yang masuk;
4. Menyusun rekapitulasi dokumen berdasarkan Data dan Informasi Pertanahan yang masuk;
5. Mencatat perkembangan dan permasalahan Data dan Informasi Pertanahan untuk mengetahui langkah pemecahannya;
6. Mengolah dan menyajikan Data dan Informasi pertanahan dalam bentuk print out;
7. Melaporkan pelaksanaan dan hasil kegiatan secara tertulis dan lisan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pertanggung jawaban;

8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

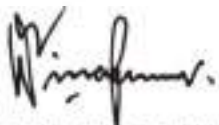
Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,
**Penata Kadastral Ahli Muda Sub
Koordinator Data dan Informasi
Pertanahan**


HAFAH, S.IP

Penata TK. I / III d
NIP. 19780820 200112 2 003

Pihak Pertama,
Pengolah Data,


WINA MARLINI, SE

Penata TK. I/ III d
NIP. 19750622 200112 2 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Tersedianya data dan informasi pertanahan Berdasarkan pelaporan yang masuk;	Jumlah data Pertanahan	Data	50
2.	Tersedianya rekapitulasi dokumen berdasarkan data dan informasi pertanahan yang tercatat dan terolah dalam bentuk print out;	Jumlah dokumen Pertanahan	Dokumen	30
3.	Tersedianya laporan pelaksanaan dan hasil kegiatan secara tertulis dan lisan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pertanggung jawaban;	Jumlah Laporan harian terkait pelaksanaan tugas	Laporan	252
4.	Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara tertulis maupun lisan;	Jumlah Laporan/dokumen kedinasan terkait urusan Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Pertanahan ;	Laporan/ dokumen	20
5.	Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

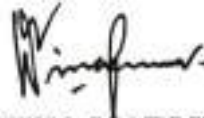
Pihak Kedua,
**Penata Kadastral Ahli Muda Sub
Koordinator Data dan Informasi
Pertanahan**



HAFAH, S.I.P

Penata TK. I / III d
NIP. 19780820 200112 2 003

Pihak Pertama,
Pengolah Data,



WINA MARLINI, SE

Penata TK. I/ III d
NIP. 19750622 200112 2 004



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ARUJI KARTAWIYANSYAH**

Jabatan : **Pengolah Data**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **INDRA GUNAWAN, S.Hut.M.Si**

Jabatan : **Penata Kadastral Ahli Muda Selaku Sub Koordinator Data Pemetaan Tematik**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Menyusun program kerja, bahan dan alat perlengkapan urusan Data dan Pemetaan Tematik sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik;
2. Memantau, kegiatan urusan Data dan Pemetaan Tematik sesuai dengan bidang tugasnya, agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal
3. Mengendalikan program kerja kegiatan urusan Data dan Pemetaan Tematik, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan;
4. Mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaannya, agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal
5. Mengevaluasi dan menyusun laporan kegiatan urusan Data dan Pemetaan Tematik secara berkala, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya; dan
6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara tertulis maupun lisan

7. Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,
**Penata Kadastral Ahli Muda Selaku
Sub Koordinator Data Pemetaan
Tematik,**


INDRA GUNAWAN, S.Hut.M.Si
Penata TK. I/III d
NIP. 19810627 201001 1 012

Pihak Pertama,
Pengolah Data


ARUJI KARTAWIYANSYAH
Pengatur / II c
NIP. 19670322 200112 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Menerima data urusan Data dan Pemetaan tematik	Jumlah data Kegiatan Urusan Data dan pemetaan Tematik	Dokumen	15
2	Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,
**Penata Kadastral Ahli Muda Selaku
Sub Koordinator Data Pemetaan
Tematik ,**


INDRA GUNAWAN, S.Hut.M.Si
Penata TK. I/III d
NIP. 19810627 201001 1 012

Pihak Pertama,
Pengolah Data


ARUJI KARTAWIYANSYAH
Pengatur Muda TK. I/ II b
NIP. 19670322 200112 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **DERI SETIAWAN**
Jabatan : **Pengolah Data**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **YOVITA DWI ANDHINI,S.H**
Jabatan : **Penata Kadastral Ahli Muda Selaku Sub Koord Penguatan Hak Atas Tanah**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Menyusun program kerja, bahan dan alat perlengkapan urusan Penguatan Hak Atas Tanah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik;
2. Memantau, kegiatan urusan Penguatan Hak Atas Tanah sesuai dengan bidang tugasnya, agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal
3. Mengendalikan program kerja kegiatan urusan Penguatan Hak Atas Tanah , sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan;
4. Mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaannya, agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal
5. Mengevaluasi dan menyusun laporan kegiatan urusan Penguatan Hak Atas Tanah secara berkala, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya; dan
6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara tertulis maupun lisan

7. Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.

Pihak kedua:

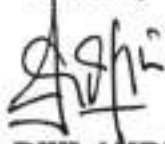
1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,
**Penata Kadastral Ahli Muda Selaku
Sub Koord Penguatan Hak Atas**

Tanah,



YOVITA DWI ANDHINI, S.H

Penata TK. I/III d

NIP. 19800107 201001 2 002

Pihak Pertama,
Pengolah Data



DERI SETIAWAN

Pengatur TK. I/ II d

NIP. 19851216 201001 1 012

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan seksi Penguatan Hak Atas Tanah	Jumlah Data yang telah terkumpul sebagai bahan sertifikasi Tanah	Dokumen	30
2.	Terlaksananya administrasi kegiatan Sertifikasi tanah asset pemerintah, data permohonan Sertifikat PTSL dan Konsolidasi lahan	Jumlah data administrasi kegiatan sertifikasi tanah asset pemerintah, data permohonan sertifikasi PTSL	Dokumen	30
3	Terlaksananya pelaporan Evaluasi Program Kerja	Jumlah laporan terkait pelaksanaan dan kegiatan Sertifikasi	Laporan	50
4	Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,
Penata Kadastral Ahli Muda Selaku
Sub Koord Penguatan Hak Atas

Tanah,


YOVITA DWI ANDHINI, S.H

Penata TK. I/III d
 NIP. 19800107 201001 2 002

Pihak Pertama,
Pengolah Data



DERI SETIAWAN

Pengatur TK. I/ II d
 NIP. 19851216 201001 1 012



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **FRIDON SAHALATUA SINAGA**

Jabatan : **Pengolah Data**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **INDRA GUNAWAN, S.Hut.M.Si**

Jabatan : **Penata Kadastral Ahli Muda Selaku Sub Koordinator Data Pemetaan Tematik**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Menyusun program kerja, bahan dan alat perlengkapan urusan Data dan Pemetaan Tematik sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik;
2. Memantau, kegiatan urusan Data dan Pemetaan Tematik sesuai dengan bidang tugasnya, agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal
3. Mengendalikan program kerja kegiatan urusan Data dan Pemetaan Tematik, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan;
4. Mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaannya, agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal
5. Mengevaluasi dan menyusun laporan kegiatan urusan Data dan Pemetaan Tematik secara berkala, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya; dan

6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara tertulis maupun lisan
7. Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,
**Penata Kadastral Ahli Muda Selaku
Sub Koordinator Data Pemetaan
Tematik ,**


INDRA GUNAWAN, S.Hut.M.Si
Penata TK. I/III d
NIP. 19810627 201001 1 012

Pihak Pertama,
Pengolah Data


FRIDON SAHALATUA SINAGA
Pengatur Muda TK. I/ II d
NIP. 19800720 200902 1 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Tersedianya data di bidang seksi data dan Pemetaan Tematik	Jumlah data Administrasi kegiatan urusan seksi data dan pemetaan Tematik	Dokumen	50
2	Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,
**Penata Kadastral Ahli Muda Selaku
Sub Koordinator Data Pemetaan
Tematik ,**


INDRA GUNAWAN, S.Hut.M.Si
Penata TK. I/III d
NIP. 19810627 201001 1 012

Pihak Pertama,
Pengolah Data


FRIDON SAHALATUA SINAGA
Pengatur Muda TK. I/ II d
NIP. 19800720 200902 1 003



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **INDRA KUSUMA ADMAZA**
Jabatan : **Pengelola Data Hak Atas Tanah**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **YOVITA DWI ANDHINI, S.H**
Jabatan : **Penata Kadastral Ahli Muda Selaku Sub Koord Penguatan Hak Atas Tanah**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Menyusun program kerja, bahan dan alat perlengkapan obyek kerja sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik;
2. Memantau, objek kerja sesuai dengan bidang tugasnya, agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal;
3. Mengendalikan program kerja, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan;
4. Mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaannya, agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal;
5. Mengevaluasi dan menyusun laporan secara berkala, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya;
6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara tertulis maupun lisan.

7. Menyesuaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,
**Penata Kadastral Ahli Muda Selaku
Sub Koord Penguatan Hak Atas
Tanah,**



YOVITA DWI ANDHINI, S.H

Penata TK. I/III d
NIP. 19800107 201001 2 002

Pihak Pertama,
Pengelola Data Hak Atas Tanah,



INDRA KUSUMA ADMAZA

Pengatur TK. I/ II d
NIP. 19861222 201001 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan Penguatan Hak Atas	Mengelola kegiatan urusan Penguatan Hak Atas Tanah	Dokumen	15
2	Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,
**Penata Kadastral Ahli Muda Selaku
Sub Koord Penguatan Hak Atas**

Tanah,


YOVITA DWI ANDHINI, S.H
Penata TK. I/III d
NIP. 19800107 201001 2 002

Pihak Pertama,
Pengelola Data Hak Atas Tanah,



INDRA KUSUMA ADMAZA
Pengatur TK. I/ II d
NIP. 19861222 201001 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **JAINUL ARIFIN**

Jabatan : **Pengelola Data Penatagunaan Tanah**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SITI AMINAH,S.Hut**

Jabatan : **Penata Kadastral Ahli Muda Selaku Sub Koord
Penatagunaan Tanah**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Menyusun program kerja, bahan dan alat perlengkapan obyek kerja sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik;
2. Memantau, objek kerja sesuai dengan bidang tugasnya, agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal;
3. Mengendalikan program kerja, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan;
4. Mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaannya, agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal;
5. Mengevaluasi dan menyusun laporan secara berkala, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya;
6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara tertulis maupun lisan.

7. Menelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,
**Penata Kadastral Ahli Muda Selaku
Sub Koord Penatagunaan Tanah**


SITI AMINAH, S.Hut
Penata Tingkat I/III d
NIP. 19750726 200801 2 011

Pihak Pertama,
Pengelola Data

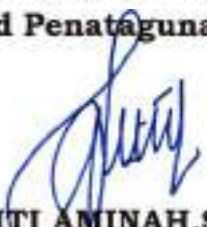

JAINUL ARIFIN
Pengatur TK. I/ II d
NIP. 198110124 200701 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Tersedianya data administrasi terkait urusan seksi Penatagunaan Tanah	Jumlah data admnistasi terkait urusan seksi Penatagunaan tanah	Dokumen	50
2	Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,
**Penata Kadastral Ahli Muda Selaku
Sub Koord Penatagunaan Tanah**


SITI AMINAH, S.Hut
Penata Tingkat I/III d
NIP. 19750726 200801 2 011

Pihak Pertama,
Pengelola Data


JAINUL ARIFIN
Pengatur TK. I/ II d
NIP. 198110124 200701 1 002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **RAHMAD ALFIAN**

Jabatan : **Pengolah Data**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **YOVITA DWI ANDHINI,S.H**

Jabatan : **Penata Kadastral Ahli Muda Selaku Sub Koord Penguatan Hak Atas Tanah**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Menyusun program kerja, bahan dan alat perlengkapan urusan Penguatan Hak Atas Tanah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik;
2. Memantau, kegiatan urusan Penguatan Hak Atas Tanah sesuai dengan bidang tugasnya, agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal
3. Mengendalikan program kerja kegiatan urusan Penguatan Hak Atas Tanah , sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan;
4. Mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaannya, agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal
5. Mengevaluasi dan menyusun laporan kegiatan urusan Penguatan Hak Atas Tanah secara berkala, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya; dan
6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara tertulis maupun lisan

7. Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,
**Penata Kadastral Ahli Muda Selaku
Sub Koord Penguatan Hak Atas**

Tanah,



YOVITA DWI ANDHINI, S.H

Penata TK. I/III d
NIP. 19800107 201001 2 002

Pihak Pertama,
Pengolah Data



RAHMAD ALFIAN

Penata Muda Tk. I/ III b
NIP. 196810071998031007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan di seksi Penguatan Hak Atas Tanah	Jumlah data permohonan Sertifikat yang telah terkumpul dan di periksa	Dokumen	30
2	Terlaksananya Rekapitulasi data permohonan Sertifikasi Aset tanah pemerintah, permohonan sertifikat PTSL dan Konsolidasi lahan yang sesuai prosedur dan ketentuan	Jumlah data permohonan Sertifikasi yang telah di rekap	Dokumen	30
3	Terwujudnya data perkembangan dan permasalahan Sertifikat tanah asset pemda, permohonan PTSL dan Konsolidasi lahan secara periodik	Jumlah data Sertifikasi tanah asset pemda, Permohonan PTSL dan Konsolidasi Lahan	Dokumen	50
4	Terlaksananya Pelaporan Evaluasi Program Kerja	Jumlah Laporan terkait hasil pelaksanaan dan kegiatan Sertifikasi	Laporan	50
5	Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,
Penata Kadastral Ahli Muda Selaku
Sub Koord Penguatan Hak Atas

Tanah,

YOVITA DWI ANDHINI, S.H

Penata TK. I/III d
NIP. 19800107 201001 2 002

Pihak Pertama,
Pengolah Data

RAHMAD ALFIAN

Penata Muda Tk. I/ III b
NIP. 196810071998031007



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **BASTIAH**
Jabatan : **Pengelola Data**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. IDIL ADHA,ST**
Jabatan : **Penyuluh Hukum Selaku Sub Koord Penyuluhan Pertanahan**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Menyusun program kerja, bahan dan alat perlengkapan obyek kerja sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik;
2. Memantau, objek kerja sesuai dengan bidang tugasnya, agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal;
3. Mengendalikan program kerja, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan;
4. Mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaannya, agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal;
5. Mengevaluasi dan menyusun laporan secara berkala, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya;
6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara tertulis maupun lisan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Terwujudnya Pelayanan Penyuluhan	Jumlah data yang dikumpulkan pada seksi Penyuluhan Pertanahan	Dokumen	30
2	Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,
**Penyuluh Hukum Selaku Sub
Penyuluhan Pertanahan,**



H. IDIL ADHA,ST

Penata/III c
NIP. 19761202 201212 1 002

Pihak Pertama,
Pengelola Data



BASTIAH

Penata Muda TK. I/ III b
NIP. 19670706 200012 2 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **EMANSYAH**
Jabatan : **Pengelola Data**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. SUNARTO.SP.,MM**
Jabatan : **Kepala Bidang Sengketa Tanah**

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Menyusun program kerja, bahan dan alat perlengkapan obyek kerja sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik;
2. Memantau, objek kerja sesuai dengan bidang tugasnya, agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal;
3. Mengendalikan program kerja, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan;
4. Mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaannya, agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal;
5. Mengevaluasi dan menyusun laporan secara berkala, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya;
6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara tertulis maupun lisan

7. Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Sengketa Tanah



H. SUNARTO, SP., MP
Pembina TK. I/IV b
NIP. 19670223 1998031004

Pihak Pertama,
Pengelola Data,



EMANSYAH
Pengatur / II c
NIP. 19690505 200701 1 064

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Terwujudnya Pelayanan Pengkajian dan Penanganan Sengketa Pertanahan	Jumlah data yang dikelola pada seksi Pengkajian dan Penanganan Sengketa Pertanahan	Dokumen	5
2	Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Sengketa Tanah


H. SUNARTO, SP., MP
Pembina TK. I/IV b
NIP. 19670223 1998031004

Pihak Pertama,
Pengelola Data,


EMANSYAH
Pengatur / II c
NIP. 19690505 200701 1 064



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ERIZA FAUZI**
Jabatan : **Pengolah Data**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **AGUS SUGIANTO,SE**
Jabatan : **Penyuluh Hukum Selaku Sub Koord Advokasi dan
Peendalian Sengketa Pertanahan**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Menyusun program kerja, bahan dan alat perlengkapan urusan Advokasi dan Pengendalian Sengketa Pertanahan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik;
2. Memantau, kegiatan urusan Advokasi dan Pengendalian Sengketa Pertanahan sesuai dengan bidang tugasnya, agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal
3. Mengendalikan program kerja kegiatan urusan Advokasi dan Pengendalian Sengketa Pertanahan , sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan;
4. Mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaannya, agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal
5. Mengevaluasi dan menyusun laporan kegiatan urusan Advokasi dan Pengendalian Sengketa Pertanahan secara berkala, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya; dan

6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara tertulis maupun lisan
7. Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,
**Penyuluh Hukum Selaku Sub
Koord Advokasi dan Peengendalian
Sengketa Pertanahan**



AGUS-SUGIANTO,SE

Penata/III c
NIP. 19740404 201001 1 002

Pihak Pertama,
Pengolah Data



ERIZA FAUZI

Pengatur TK. I/ II d
NIP. 19810401 200701 1 004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Tersedianya data Seksi Advokasi dan Pengendalian Sengketa Pertanahan	Jumlah data yang dikumpulkan, di terima dan diolah pada seksi Advokasi dan Pengendalian Sengketa Pertanahan	Dokumen	30
2	Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,
**Penyuluh Hukum Selaku Sub
Koord Advokasi dan Peengendalian
Sengketa Pertanahan**



AGUS SUGIANTO,SE

Penata/III c
NIP. 19740404 201001 1 002

Pihak Pertama,
Pengolah Data



ERIZA FAUZI

Pengatur TK. I/ II d
NIP. 19810401 200701 1 004



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **HERU RUJIAN**
Jabatan : **Pengelola Data**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **AGUS SUGIANTO,SE**
Jabatan : **Penyuluh Hukum Selaku Sub Koord Advokasi dan
Peengendalian Sengketa Pertanahan**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Menyusun program kerja, bahan dan alat perlengkapan obyek kerja sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik;
2. Memantau, objek kerja sesuai dengan bidang tugasnya, agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal;
3. Mengendalikan program kerja, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan;
4. Mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaannya, agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal;
5. Mengevaluasi dan menyusun laporan secara berkala, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya;
6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara tertulis maupun lisan

7. Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,
**Penyuluh Hukum Selaku Sub
Koord Advokasi dan Peengendalian
Sengketa Pertanahan**



AGUS SUGIANTO, SE

Penata/III c
NIP. 19740404 201001 1 002

Pihak Pertama,
Pengelola Data



HERU RUJIAN

Pengatur Muda TK. I/ II d
NIP. 19800614 200604 1 017

**PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERTANAHAN DAN
KABUPATEN KUTAI**



**TAHUN 2022
PENATAAN RUANG
KARTANEGARA**

NO	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Terwujudnya Pelayanan data di seksi advokasi dan Pengendalian Sengketa Pertanahan	Jumlah data yang disusun, di kendalikan, dan di koordinasikan pada seksi advokasi dan Pengendalian Sengketa Pertanahan	Dokumen	10
2	Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,
**Penyuluh Hukum Selaku Sub
Koord Advokasi dan Peengendalian
Sengketa Pertanahan**


AGUS SUGIANTO, SE
Penata/III c
NIP. 19740404 201001 1 002

Pihak Pertama,
Pengelola Data


HERU RUJIAN
Pengatur Muda TK. I/ II d
NIP. 19800614 200604 1 017



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **JUMIAH**
Jabatan : **Pengadministrasi Umum**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. IDIL ADHA,ST**
Jabatan : **Penyuluh Hukum Selaku Sub Koord Penyuluhan Pertanahan**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Menerima, mencatat, dan menyortir surat masuk, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pencarian.
2. Memberi lembar pengantar pada surat, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pengendalian;
3. Mengelompokkan surat atau dokumen menurut jenis dan sifatnya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pendistribusian;
4. Mendokumentasikan surat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tertib
5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban; dan
6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan.
7. Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,
**Penyuluh Hukum Selaku Sub
Penyuluhan Pertanahan,**



H. IDIL ADHA, ST

Penata/III c
NIP. 19761202 201212 1 002

Pihak Pertama,
Pengadministrasi Umum,



JUMIAH

Pengatur Muda TK. I/ II d
NIP. 196700327 200701 2 012

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Terwujudnya Pelayanan Penyuluhan	Jumlah data yang diterima dan diolah n pada seksi Penyuluhan Pertanahan	Dokumen	25
2	Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,
**Penyuluh Hukum Selaku Sub
Penyuluhan Pertanahan,**


H. IDIL ADHA, ST

Penata/III c
NIP. 19761202 201212 1 002

Pihak Pertama,
Pengadministrasi Umum,


JUMIAH

Pengatur Muda TK. I/ II d
NIP. 196700327 200701 2 012



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **LUSINEM,SE**
Jabatan : **Pengolah Data**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. SUNARTO.SP.,MM**
Jabatan : **Kepala Bidang Sengketa Tanah**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Menyusun program kerja, bahan dan alat perlengkapan urusan Pengkajian dan Penanganan Sengketa Pertanahan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik;
2. Memantau, kegiatan urusan Pengkajian dan Penanganan Sengketa Pertanahan sesuai dengan bidang tugasnya, agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal
3. Mengendalikan program kerja kegiatan urusan Pengkajian dan Penanganan Sengketa Pertanahan , sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan;
4. Mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaannya, agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal
5. Mengevaluasi dan menyusun laporan kegiatan urusan Pengkajian dan Penanganan Sengketa Pertanahan secara berkala, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya; dan

6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara tertulis maupun lisan
7. Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Sengketa Tanah


H. SUNARTO, SP., MM
Pembina TK. I/IV b
NIP. 19670223 1998031004

Pihak Pertama,
Pengolah Data


LUSINEM, SE
Penata / III c
NIP. 19790407 201212 2 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Tersedianya data Seksi Penkajian dan Penanganan Sengketa Tanah	Jumlah data yang dikumpulkan, di terima dan diolah pada seksi Pengkajian dan Penanganan Sengketa Pertanahan	Dokumen	30
2	Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Sengketa Tanah


H. SUNARTO, SP., MM
Pembina TK. I/IV b
NIP. 19670223 1998031004

Pihak Pertama,
Pengolah Data


LUSINEM, SE
Penata / III c
NIP. 19790407 201212 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MUSLIM GUNAWAN, S.Hut**
Jabatan : **Pengolah Data**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. SUNARTO.SP.,MM**
Jabatan : **Kepala Bidang Sengketa Tanah**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Menyusun program kerja, bahan dan alat perlengkapan urusan Pengkajian dan Penanganan Sengketa Pertanahan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik;
2. Memantau, kegiatan urusan Pengkajian dan Penanganan Sengketa Pertanahan sesuai dengan bidang tugasnya, agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal
3. Mengendalikan program kerja kegiatan urusan Pengkajian dan Penanganan Sengketa Pertanahan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan;
4. Mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaannya, agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal
5. Mengevaluasi dan menyusun laporan kegiatan urusan Pengkajian dan Penanganan Sengketa Pertanahan secara berkala, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya; dan
6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara tertulis maupun lisan

7. Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Sengketa Tanah



H. SUNARTO, SP., MP
Pembina TK. I/IV b
NIP. 19670223 1998031004

Pihak Pertama,
Pengolah Data



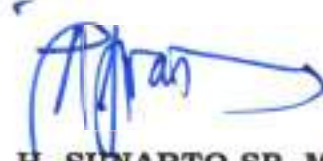
MUSLIM GUNAWAN, S.Hut
Penata TK. I/ III d
NIP. 19720620 200604 1 012

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

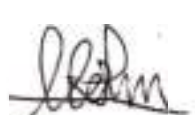
NO	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Terwujudnya Pelayanan dan penanganan Sengketa Pertanahan	Jumlah data yang dikumpulkan, dan di proses pada seksi Pengkajian dan Penanganan Sengketa Pertanahan	Dokumen	30
		Persentase data yang telah terkumpul dan di proses	Persentase	85
		Waktu Penyelesaian	Bulan	12
2	Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,
Kepala Bidang Sengketa Tanah


H. SUNARTO, SP., MP
Pembina TK. I/IV b
NIP. 19670223 1998031004

Pihak Pertama,
Pengolah Data


MUSLIM GUNAWAN, S.Hut
Penata TK. I/ III d
NIP. 19720620 200604 1 012



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **NUR AISYAH**
Jabatan : **Pengadministrasi Umum**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **AGUS SUGIANTO,SE**

Jabatan : **Penyuluh Hukum Selaku Sub Koord Advokasi dan
Peengendalian Sengketa Pertanahan**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Menerima, mencatat, dan menyortir surat masuk, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pencarian.
2. Memberi lembar pengantar pada surat, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pengendalian;
3. Mengelompokkan surat atau dokumen menurut jenis dan sifatnya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan pendistribusian;
4. Mendokumentasikan surat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tertib
5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban; dan
6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan.
7. Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya

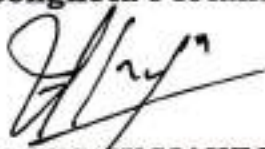
Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,
**Penyuluh Hukum Selaku Sub
Koord Advokasi dan Peengendalian
Sengketa Pertanahan**



AGUS SUGIANTO, SE

Penata/III c
NIP. 19740404 201001 1 002

Pihak Pertama,
Pengadministrasi Umum



NUR AISYAH

Pengatur TK. I/ II d
NIP. 19800913 200701 2 014

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Tersedianya data di seksi advokasi dan Pengendalian Sengketa Tanah	Jumlah data yang di terima dan diolah di seksi Advokasi dan Pengendalian Sengketa Tanah	Dokumen	30
2	Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,
**Penyuluh Hukum Selaku Sub
Koord Advokasi dan Peendalian
Sengketa Pertanahan**


AGUS SUGIANTO, SE
Penata/III c
NIP. 19740404 201001 1 002

Pihak Pertama,
Pengadministrasi Umum


NUR AISYAH
Pengatur TK. I/ II d
NIP. 19800913 200701 2 014



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **RUSMAN**
Jabatan : **Pengolah Data**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H. IDIL ADHA,ST**
Jabatan : **Penyuluh Hukum Selaku Sub Koord Penyuluhan Pertanahan**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Menyusun program kerja, bahan dan alat perlengkapan urusan Penyuluhan Pertanahan Sengketa Pertanahan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik;
2. Memantau, kegiatan urusan Penyuluhan Pertanahan Sengketa Pertanahan sesuai dengan bidang tugasnya, agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal
3. Mengendalikan program kerja kegiatan urusan Penyuluhan Pertanahan Sengketa Pertanahan , sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan;
4. Mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaannya, agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal
5. Mengevaluasi dan menyusun laporan kegiatan urusan Penyuluhan Pertanahan Sengketa Pertanahan secara berkala, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya; dan
6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah atasan baik secara tertulis maupun lisan

7. Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,
**Penyuluh Hukum Selaku Sub
Penyuluhan Pertanian,**



H. IDIL ADHA, ST
Penata/III c
NIP. 19761202 201212 1 002

Pihak Pertama,
Pengolah Data



RUSMAN
Pengatur TK. I/ II d
NIP. 19801314 200902 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Terwujudnya Pelayanan Penyuluhan	Jumlah data Kegiatan Urusan Penyuluhan Pertanahan yang di terima dan diolah pada seksi Penyuluhan Pertanahan	Dokumen	100
2	Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,
**Penyuluh Hukum Selaku Sub
Penyuluhan Pertanahan,**



H. IDIL ADHA, ST
Penata/III c
NIP. 19761202 201212 1 002

Pihak Pertama,
Pengolah Data



RUSMAN
Pengatur TK. I/ II d
NIP. 19801314 200902 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ANDRI RETIADI**

Jabatan : **Pengawas Tata Ruang**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H.TONNY HIDAYAT,ST.,M.Si.**

Jabatan : **Penata Ruang**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Menerima, mencatat, dan menyortir surat aduan yang masuk, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan penindakan di lapangan..
2. Melakukan persiapan survey lapangan, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar memudahkan penindakan di lapangan;
3. Mendokumentasikan hasil Lapangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tertib administrasi
4. Mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka program pengawasan dan penindaka terhadap pelanggaran Tata ruang yang terjadi untuk mencapai hasil yang optimal
5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban; dan

6. Mengevaluasi proses penyusunan urusan penyusun kebutuhan barang inventaris sesuai prosedur sebagai bahan perbaikan dan kesempurnaan tercapainya sasaran;
7. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan.
8. Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
9. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,
Penata Ruang



H.TONNY HIDAYAT, ST., M. Si

Pembina -IV/a
NIP. 197710092005021001

Pihak Pertama,
Pengawas Tata Ruang



ANDRI RETIADI

Penata Tingkat I/ III d
NIP. 198311182007011003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Tersedianya data pengawasan di seksi pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	Jumlah data kegiatan urusan seksi pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	Dokumen	100
2.	Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,
Penata Ruang



H.TONNY HIDAYAT, ST., M.Si

Pembina - IV/a
NIP. 197710092005021001

Pihak Pertama,
Pengawas Tata Ruang



ANDRI RETIADI

Penata Tingkat I - III/ d
NIP. 198311182007011003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MOHD.RESA NUGRAHA**

Jabatan : Pengolah Data Pengukuran dan Pemetaan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H.M.FACHROMI,ST**

Jabatan : Penata Ruang

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mempelajari pedoman dan petunjuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui macam, metode dan teknik dalam mengolah kegiatan urusan Pengolah Data Pengukuran dan Pemetaan
2. Mengumpulkan dan memeriksa data sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan kegiatan berdasarkan jenis dan kegiatan urusan Pengolah Data Pengukuran dan Pemetaan
3. Menganalisis kegiatan urusan Pengolah Data Pengukuran dan Pemetaan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk menghasilkan kebenaran informasi dan volume kegiatan berdasarkan laporan yang masuk
4. Menyusun rekapitulasi kegiatan berdasarkan jenis kegiatan urusan Pengolah Data Pengukuran dan Pemetaan yang masuk sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui volume dan jenis urusan Pengolah Data Pengukuran dan Pemetaan yang akan diolah

5. Mencatat perkembangan dan permasalahan kegiatan urusan Pengolah Data Pengukuran dan Pemetaan secara periodik sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui langkah pemecahannya
6. Mengolah dan menyajikan kegiatan urusan Pengolah Data Pengukuran dan Pemetaan dalam bentuk yang telah ditetapkan sebagai bahan proses lebih lanjutMengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaannya, agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal;
7. Melaporkan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban
8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.
9. Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
10. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,
Penata Ruang



H.M.FACHROMI,ST
Penata TK. I/III d
NIP. 198111082006041012

Pihak Pertama,
**Pengolah Data Pengukuran dan
Pemetaan**



MOHD.RESA NUGRAHA
Pengatur / II c
NIP. 197904102010011020

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Tersedianya data seksi pemetaan tata ruang	Jumlah data kegiatan urusan pengolah data pengukuran dan pemetaan	dokumen	100
7.	Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,
Penata Ruang



H.M.FACHROMI,ST
Penata TK. I/III d
NIP. 198111082006041012

Pihak Pertama,
Pengolah Data Pengukuran dan Pemetaan



MOHD.RESA NUGRAHA
Pengatur / II c
NIP. 197904102010011020



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MEI ROSANA PUSPITASARI,ST**

Jabatan : **Analisis Pemanfaatan Ruang**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H.TONNY HIDAYAT,ST.,M.Si.**

Jabatan : **Penata Ruang**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mengumpulkan bahan-bahan urusan Pemanfaatan dan Pengendalian ruang sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan
2. Mempelajari, menganalisa serta menelaah bahan-bahan sesuai dengan urusan Pemanfaatan dan pengendalian ruang dalam bidangnya agar memperlancar pelaksanaan tugas
3. Mengadakan penelitian berdasarkan permasalahan urusan Pemanfaatan Dan Pengendalian ruang dalam rangka menyelesaikan pekerjaan
4. Membuat laporan berdasarkan urusan Pemanfaatan Dan Pengendalian untuk disampaikan kepada Atasan agar hasil telaahan dapat bermanfaat
5. Memberikan saran berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya urusan Pemanfaatan pengendalian ruang untuk disampaikan kepada Atasan

6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan.
7. Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,
Penata Ruang



H.TONNY HIDAYAT, ST., M. Si

Pembina - IV/a
NIP. 197710092005021001

Pihak Pertama,
Analisis Pemanfaatan Ruang



MEI ROSANA PUSPITASARI, ST

Penata - III/c
NIP. 198105022011012002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Terwujudnya data di seksi pemanfaatan dan pengendalian Tata Ruang	Jumlah telaah dan Analisa data urusan pemanfaatan dan pengendalian ruang	Dokumen	100
2	Menyelesaikan Laporan harta kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Tingkat Kepatuhan LHKASN pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,
Penata Ruang



H.TONNY HIDAYAT,ST.,M.Si
Pembina - IV/a
NIP. 197710092005021001

Pihak Pertama,
Analisis Pemanfaatan Ruang



MEI ROSANA PUSPITASARI,ST
Penata - III/c
NIP. 198105022011012002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **RAHMADIA INDRIASARI,SE**

Jabatan : **Pengelola Data**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H.TONNY HIDAYAT,ST.,M.Si.**

Jabatan : **Penata Ruang**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Menyusun program kerja, bahan dan alat perlengkapan urusan Pengelola Tata ruang sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik
2. Memantau, kegiatan urusan Pengelola Tata Ruang sesuai dengan bidang tugasnya, agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal;
3. Mengendalikan program kerja kegiatan urusan Pengelolaan Tata Ruang sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan;
4. Mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaannya, agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal;
5. Mengevaluasi dan menyusun laporan kegiatan urusan Pengelola Tata Ruang secara berkala, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya; dan

6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan.
7. Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,
Penata Ruang



H.TONNY HIDAYAT, ST., M. Si

Pembina -IV/a
NIP. 197710092005021001

Pihak Pertama,
Pengelola Data



RAHMADIA INDRIASARI, SE

Penata Tk.I - III/d
NIP. 197308242007012011

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Terwujudnya data di seksi pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	Jumlah data kegiatan yang dikelola pada seksi pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	Dokumen	100
2	Menyelesaikan Laporan harta kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Tingkat Kepatuhan LHKASN pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,
Penata Ruang



H.TONNY HIDAYAT,ST.,M.Si

Pembina - IV/a
NIP. 197710092005021001

Pihak Pertama,
Pengelola Data



RAHMADIA INDRIASARI,SE

Penata Tk.I - III/d
NIP. 197308242007012011



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **RIMA FITRIANI,SE**

Jabatan : Analis Peta Wilayah

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H.M.FACHROMI,ST**

Jabatan : Penata Ruang

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mengumpulkan bahan-bahan urusan perencanaan tata ruang sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan
2. Mempelajari, menganalisa serta menelaah bahan-bahan sesuai dengan urusan perencanaan tata ruang dalam bidangnya agar memperlancar pelaksanaan tugas
3. Mengadakan penelitian berdasarkan permasalahan urusan perencanaan tata ruang dalam rangka menyelesaikan pekerjaan
4. Membuat laporan berdasarkan urusan perencanaan tata ruang untuk disampaikan kepada Atasan agar hasil telaahan dapat bermanfaat
5. Memberikan saran berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya urusan perencanaan tata ruang untuk disampaikan kepada Atasan

6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.
7. Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,
Penata Ruang



H.M.FACHROMI,ST
Penata TK. I/III d
NIP. 198111082006041012

Pihak Pertama,
Analisis Peta Wilayah



RIMA FITRIANI,SE
Penata Tk.I - III/c
NIP. 198307122010011017

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
(NAMA PERANGKAT DAERAH)
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Tersedianya data seksi pemetaan tata ruang	Menelaah dan menganalisa Menyusun rencana kegiatan urusan pemetaan tata ruang	dokumen	100
2.	Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,
Penata Ruang



H.M.FACHROMI,ST
Penata TK. I/III d
NIP. 198111082006041012

Pihak Pertama,
Analisis Peta Wilayah



RIMA FITRIANI,SE
Penata Tk.I - III/c
NIP. 198307122010011017



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **RUSTAN WAHYUDI,ST**

Jabatan : **Analisis Penertiban Pemanfaatan Ruang**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **H.TONNY HIDAYAT,ST.,M.Si.**

Jabatan : **Penata Ruang**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mengumpulkan bahan-bahan urusan Penertiban Pemanfaatan ruang sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan
2. Mempelajari, menganalisa serta menelaah bahan-bahan sesuai dengan urusan Penertiban Pemanfaatan ruang dalam bidangnya agar memperlancar pelaksanaan tugas
3. Mengadakan penelitian berdasarkan permasalahan urusan Penertiban Pemanfaatan ruang dalam rangka menyelesaikan pekerjaan
4. Membuat laporan berdasarkan urusan Penertiban Pemanfaatan untuk disampaikan kepada Atasan agar hasil telaahan dapat bermanfaat
5. Memberikan saran berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya urusan Penertiban Pemanfaatan ruang untuk disampaikan kepada Atasan

6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan.
7. Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,
Penata Ruang



H.TONNY HIDAYAT, ST., M. Si

Pembina - IV/a
NIP. 197710092005021001

Pihak Pertama,
Analisis Penertiban Pemanfaatan Ruang



RUSTAN WAHYUDI, ST

Penata Tk.I - III/d
NIP. 197603082001121007

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Terwujudnya tertib data di seksi pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	Jumlah data, dokumen dan berkas yang telah di telaah dan dianalisa terkait urusan penertiban pemanfaatan ruang	Dokumen	100
2	Menyelesaikan Laporan harta kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Tingkat Kepatuhan LHKASN pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,
Penata Ruang


H. TONNY HIDAYAT, ST., M. Si
Pembina – IV/a
NIP. 197710092005021001

Pihak Pertama,
Pengawas Tata Ruang


RUSTAN WAHYUDI, ST
Penata Tingkat I/ III d
NIP. 197603082001121007



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SITI HAMIDAH**

Jabatan : **Pengelola Tata Ruang**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **YUDO ARWINANTO,ST**

Jabatan : **Penata Ruang**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Menyusun program kerja, bahan dan alat perlengkapan urusan perencanaan tata ruang sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik
2. Memantau, kegiatan urusan perencanaan tata ruang sesuai dengan bidang tugasnya, agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal;
3. Mengendalikan program kerja kegiatan urusan perencanaan tata ruang , sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan
4. Mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaannya, agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal
5. Mengevaluasi dan menyusun laporan kegiatan urusan perencanaan tata ruang secara berkala, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya;

6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan.
7. Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,
Penata Ruang



YUDO ARWINANTO,ST

Penata -III/ c
NIP. 198206172011011001

Pihak Pertama,
Pengelola Tata Ruang



SITI HAMIDAH

Pengatur Tk.I - II/d
NIP. 198103132006042022

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

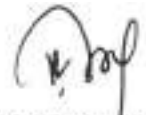
NO	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Tersedianya data perencanaan tata ruang terkait dengan rencana detail tata ruang wilayah kabupaten (RDTR Kabupaten)	Jumlah data perencanaan tata ruang terkait dengan rencana detail tata ruang wilayah kabupaten (RDTR Kabupaten)	Dokumen	24
2	Terlaksanannya pengumpulan dan pengolahan data pada seksi perencanaan tata ruang	Jumlah Data Urusan perencanaan tata ruang	Dokumen	100
3.	Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,
Penata Ruang


YUDO ARWINANTO,ST
 Penata -III/ c
 NIP. 198206172011011001

Pihak Pertama,
Pengelola Tata Ruang


SITI HAMIDAH
 Pengatur Tk.I - II/d
 NIP. 19810313200604202



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SYARIFAH EVI HERMAWATI**

Jabatan : **Penyusun Rencana Tata Ruang dan Zonasi**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **YUDO ARWINANTO,ST**

Jabatan : **Penata Ruang**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Menyusun program kerja, bahan dan alat perlengkapan urusan perencanaan tata ruang sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik
2. Memantau, kegiatan urusan perencanaan tata ruang sesuai dengan bidang tugasnya, agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal;
3. Mengendalikan program kerja kegiatan urusan perencanaan tata ruang , sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan
4. Mengkoordinasikan dengan unit-unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaannya, agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal
5. Mengevaluasi dan menyusun laporan kegiatan urusan perencanaan tata ruang secara berkala, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya; dan

6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan.
7. Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
8. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,
Penata Ruang


YUDO ARWINANTO, ST
Penata -III/ c
NIP. 198206172011011001

Pihak Pertama,
Penyusun Rencana Tata Ruang dan

Zonasi

SYARIFAH EVI HERMAWATI
Pengatur Tk.I - II/d
NIP. 197504222007012017

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Tersedianya data Perencanaan Tata Ruang	Jumlah data terkait seksi perencanaan tata ruang	Dokumen	100
2	Menyelesaikan Laporan harta kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Tingkat Kepatuhan LHKASN pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,
Penata Ruang


YUDO ARWINANTO,ST
Penata -III/ c
NIP. 198206172011011001

Pihak Pertama,
**Penyusun Rencana Tata Ruang dan
Zonasi**


SYARIFAH EVI HERMAWATI
Pengatur Tk.I - II/d
NIP. 197504222007012017



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **UPIK AGUSTIANI PERDANA,ST.,M.P.W.K**

Jabatan : **ANALIS TATA RUANG**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **YUDO ARWINANTO,ST**

Jabatan : **PENATA RUANG**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mengumpulkan bahan-bahan urusan perencanaan tata ruang sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian
2. Mengumpulkan bahan-bahan urusan perencanaan tata ruang sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk keperluan penyelesaian pekerjaan;
3. Mengadakan penelitian berdasarkan permasalahan urusan perencanaan tata ruang dalam rangka menyelesaikan pekerjaan
4. Membuat laporan berdasarkan urusan perencanaan tata ruang untuk disampaikan kepada Atasan agar hasil telaahan dapat bermanfaat
5. Memberikan saran berdasarkan pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatannya urusan perencanaan tata ruang untuk disampaikan kepada Atasan
6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan.
7. Menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,
PENATA RUANG



YUDO ARWINANTO,ST
Penata / III c
NIP. 198206172011011001

Pihak Pertama,
ANALIS TATA RUANG



UPIK AGUSTIANI PERDANA,ST
Penata/ III c
NIP. 198708132011012002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Tersediannya data di seksi perencanaan	Jumlah Data yang diterima dan diolah untuk keperluan kegiatan urusan pemetaan tata ruang	Dokumen	100
2	Menyelesaikan Laporan harta kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Tingkat Kepatuhan LHKASN pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,
PENATA RUANG


YUDO ARWINANTO,ST
Penata / III c
NIP. 198206172011011001

Pihak Pertama,
ANALIS TATA RUANG


UPIK AGUSTIANI PERDANA,ST
Penata / III c
NIP. 198708132011012002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **WAHDAYANI,ST.,M.Si.**

Jabatan : **Analisis Pengembangan Wilayah**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **YUDO ARWINANTO,ST**

Jabatan : **Penata Ruang**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Menerima dan memeriksa bahan dan data urusan perencanaan tata ruang sesuai prosedur sebagai bahan kajian dalam rangka penyusunan urusan perencanaan tata ruang;
2. Mengumpulkan dan mengklasifikasikan bahan dan data urusan perencanaan tata ruang sesuai spesifikasi dan prosedur untuk memudahkan apabila diperlukan;
3. Mempelajari dan mengkaji karakteristik, spesifikasi dan hal-hal yang terkait dengan urusan perencanaan tata ruang sesuai prosedur dalam rangka penJrusunan urusan perencanaan tata ruang.;
4. Menyusun konsep penyusunan urusan perencanaan tata ruang sesuai dengan hasil kajian dan prosedur untuk tercapainya sasaran yang diharapkan;
5. Mendiskusikan konsep penyusunan urusan perencanaan tata ruang dengan pejabat yang berwenang dan terkait sesuai prosedur untuk kesempurnaan penyusunan urusan perencanaan tata ruang;
6. Menyusun kembali obyek kerja berdasarkan hasil diskusi sesuai prosedur untuk kelancaran dan optimalisasi penyusunan urusan perencanaan tata ruang;

7. Mengevaluasi proses penyusunan urusan perencanaan tata ruang sesuai prosedur sebagai bahan perbaikan dan kesempurnaan tercapainya sasaran;
8. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban; dan Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik tertulis maupun lisan

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir)

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,
Penata Ruang


YUDO ARWINANTO,ST
Penata -III/ c
NIP. 198206172011011001

Pihak Pertama,
Analisis Pengembangan Wilayah


WAHDAYANI,ST.,M.Si.
Penata - III/c
NIP. 198503042011012004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	SASARAN / URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Tersedianya data di seksi perencanaan	Jumlah data Urusan perencanaan tata ruang	Dokumen	100
2	Menyelesaikan Laporan harta kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Tingkat Kepatuhan LHKASN pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,
Penata Ruang


YUDO ARWINANTO,ST
Penata -III/ c
NIP. 198206172011011001

Pihak Pertama,
Analisis Pengembangan Wilayah


WAHDAYANI,ST,M.Si.
Penata - III/c
NIP. 198503042011012004